



**GAMBARAN PENERAPAN KEBIJAKAN SEKOLAH SIAGA BENCANA
TINGKAT SEKOLAH DASAR DI YOGYAKARTA TAHUN 2019**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Kesehatan Masyarakat

Disusun:

Anggita Ratna Dewi

NIM 6411415074

**JURUSAN ILMU KESEHATAN MASYARAKAT
FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
2020**

ABSTRAK

Anggita Ratna Dewi

Gambaran Penerapan Kebijakan Sekolah Siaga Bencana Tingkat Sekolah Dasar di Yogyakarta Tahun 2019

XIV + 206 halaman + 38 tabel + 11 lampiran

Pendidikan siaga bencana penting bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama mengenalkannya sejak dini di sekolah. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui gambaran penerapan kebijakan sekolah siaga bencana tingkat sekolah dasar di Yogyakarta.

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Instrumen penelitian menggunakan lembar observasi, panduan wawancara, dan lembar studi dokumen. Informan dalam penelitian ini adalah Kepala Sekolah, Guru Penanggung Jawab Program SSB, Komite Sekolah, Dinas Pendidikan, dan BPBD.

Dari 17 poin indikator terdiri dari visi misi dengan 2 poin indikator; peraturan/kesepakatan dengan 4 poin indikator; penganggaran dengan 3 poin indikator; program kegiatan/perencanaan dengan 6 poin indikator; dan monitoring evaluasi dengan 2 poin indikator di SD X Kota Yogyakarta terdapat 10 (58,8%) indikator yang sesuai, 5 (29,4%) indikator tidak sesuai, dan 2 (11,8%) indikator belum diterapkan. Sedangkan di SD Y Kabupaten Sleman terdapat 10 (58,8%) indikator sesuai, 3 (17,7%) indikator tidak sesuai, dan 4 (23,5%) indikator belum diterapkan.

Penerapan kebijakan sekolah siaga bencana di SD X Kota Yogyakarta lebih tinggi dari SD Y Kabupaten Sleman.

Kata kunci: kebijakan, sekolah siaga bencana, SD X Kota Yogyakarta, SD Y Kabupaten Sleman

*Public Health Departement
Sport Science Faculty
Semarang State University
November 2019*

ABSTRACT

Anggita Ratna Dewi

Overview of the Implementation of Disaster Preparedness School Policies on Elementary School in Yogyakarta 2019

XIV + 206 pages + 38 tables + 11 appendices

Disaster preparedness education is important for all Indonesian people, The purpose of this research is to find out the description of the implementation of disaster preparedness school policies at the elementary school level in Yogyakarta.

This type of research is descriptive qualitative. The research instrument used observation sheets, interview guides, and document study sheets. Informants in this study were the Principal, the Teacher in Charge of the SSB Program, the School Committee, the Education Office, and the BPBD.

From 17 indicator points consisting of vision and mission with 2 indicator points; regulations / agreements with 4 indicator points; budgeting with 3 indicator points; program activities / planning with 6 indicator points; and monitoring evaluation with 2 indicator points in SD X Yogyakarta City, there are 10 (58.8%) suitable indicators, 5 (29.4%) indicators are not suitable, and 2 (11.8%) indicators are not available. Whereas in SD Y Sleman Regency there are 10 (58.8%) indicators are suitable, 3 (17.7%) indicators are not suitable, and 4 (23.5%) indicators are not available.

The implementation of disaster preparedness school policy in SD X Yogyakarta City is higher than SD Y Sleman Regency.

Keywords: policy, school alert disaster, SD X Yogyakarta City, SD Y Sleman Regency

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam Skripsi yang berjudul "Gambaran Penerapan Kebijakan Sekolah Siaga Bencana Tingkat Sekolah Dasar di Yogyakarta Tahun 2019" ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh Gelar Kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam pustaka.

Semarang, November 2019

Penulis,



Anggita Ratna Dewi
NIM. 6411415074

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul "Gambaran Penerapan Kebijakan Sekolah Siaga Bencana tingkat Sekolah Dasar di Yogyakarta Tahun 2019" yang disusun oleh Anggita Ratna Dewi, NIM 6411415074 telah dipertahankan di hadapan panitia ujian pada Ujian Skripsi Jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Semarang, yang dilaksanakan pada:

Hari, tanggal : Selasa, 10 Desember 2019

Tempat : Ruang Ujian A

Panitia Ujian



Sekretaris,

Sofwan Indarjo, S.KM., M.Kes
NIP. 197607192008121002

Dewan Penguji

Tanggal

Penguji I

Drs. Herry Koesyanto, M.S
NIP. 195801221986012001

18 / 2019
12

Penguji II

dr. Anik Setyo Wahyuningsih, M.Kes
NIP. 197409032006042001

19 / 2019
12

Penguji III

Evi Widowati, S.KM, M.Kes
NIP. 198302062008122003

19 / 2019
12

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO:

Sesuatu yang belum dikerjakan, seringkali tampak mustahil, kita baru yakin kalau kita telah berhasil melakukannya dengan baik (Evelyn Underhill, 1942).

PERSEMBAHAN:

Karya ini ku persembahkan untuk:

1. Ayahanda Agus M. Muklis,
dan Ibunda Siti Munawaroh
2. Almamater Universitas Negeri
Semarang

PRAKATA

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat, taufik dan karunia-Nya, sehingga tersusun skripsi yang berjudul “Gambaran Penerapan Kebijakan Sekolah Siaga Bencana Tingkat Sekolah Dasar di Yogyakarta Tahun 2019” dapat terselesaikan dengan baik. Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk melengkapi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Kesehatan Masyarakat di Universitas Negeri Semarang.

Sehubungan dengan penyelesaian skripsi ini, dengan rendah hati disampaikan terimakasih kepada:

1. Dekan Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Semarang, Prof. Dr. Tandiyo Rahayu M.Pd., atas Surat Keputusan penetapan Dosen Pembimbing Skripsi ini.
2. Ketua Jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Semarang, Bapak Irwan Budiono, S.KM. M.Kes., atas persetujuan penelitian ini.
3. Pembimbing, Ibu Evi Widowati, S.K.M., M.Kes, atas bimbingan, arahan serta masukan dalam penyusunan Skripsi ini.
4. Penguji I, Bapak Drs. Herry Koesyanto, M.S., atas saran, arahan, dan motivasinya dalam penyusunan skripsi ini.
5. Penguji II, Ibu dr. Anik Setyo Wahyuningsih, M.Kes, atas saran, arahan, dan motivasinya dalam penyusunan skripsi ini .

6. Kepala Sekolah dan Komite SD X Kota Yogyakarta dan SD Y Kabupaten Sleman atas izin penelitian.
7. BPBD Kota Yogyakarta dan BPBD Kabupaten Sleman, atas informasi terkait kebijakan Sekolah Siaga Bencana tingkat Sekolah Dasar.
8. Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta dan Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman atas informasi terkait kebijakan Sekolah Siaga Bencana tingkat Sekolah Dasar.
9. Ibunda Siti Munawaroh dan Ayahanda Agus Muhammad Muklis, atas do'a, motivasi, semangat, kasih sayangnya, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
10. Teman Jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat Angkatan 2015, atas kebersamaan, semangat, dan motivasinya dalam penyusunan skripsi ini.
11. Semua pihak terlibat yang tidak dapat disebutkan satu persatu, atas bantuannya dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga amal baik dari semua pihak mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT..Disadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan guna penyempurnaan skripsi ini.Semoga skripsi ini dapat bermanfaat.

Semarang, November 2019

Penyusun

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
PERNYATAAN	iv
PENGESAHAN	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
PRAKATA	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
DAFTAR ISTILAH	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG.....	1
1.2 RUMUSAN MASALAH	9
1.3 TUJUAN PENELITIAN	9
1.4 MANFAAT.....	9
1.4.1 .. Bagi Sekolah Dasar	9
1.4.2 Bagi Jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat	9
1.4.3 Bagi Peneliti	9
1.5 KEASLIAN PENELITIAN	10
1.6 RUANG LINGKUP PENELITIAN.....	12
1.6.1 Ruang Lingkup Tempat	12
1.6.2 Ruang Lingkup Waktu.....	12
1.6.3 Ruang Lingkup Keilmuan	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	14
2.1 LANDASAN TEORI.....	14

2.1.1 Bencana.....	14
2.1.2 Bencana Sosial	15
2.1.3 Bencana Non Alam.....	16
2.1.4 Bencana Alam	18
2.1.5 Pengurangan Risiko Bencana.....	27
2.1.6 Sistem Manajemen Bencana	28
2.1.7 Sekolah Siaga Bencana.....	37
2.2 KERANGKA TEORI	49
BAB III METODE PENELITIAN	50
3.1 ALUR PIKIR.....	50
3.2 FOKUS PENELITIAN	50
3.3 JENIS DAN RANCANGAN PENELITIAN	52
3.4 SUMBER INFORMASI	52
3.4.1 Data Primer	53
3.4.2 Data Sekunder	53
3.5 INSTRUMEN PENELITIAN DAN TEKNIK PENGAMBILAN DATA	57
3.5.1 Instrumen Penelitian.....	57
3.5.2 Teknik Pengambilan Data.....	59
3.6 PROSEDUR PENELITIAN.....	60
3.6.1 Tahap Pra Penelitian	60
3.6.2 Tahap Pelaksanaan Penelitian	61
3.6.3 Tahap Pasca Penelitian	61
3.7 PEMERIKSAAN KEABSAHAN DATA.....	61
3.7.1 <i>Cross-check</i> data dengan fakta dari sumber lainnya	62
3.7.2 Membandingkan dan melakukankontras data.....	62
3.7.3 Gunakan kelompok informan yang sangat berbeda semaksimal mungkin.....	62
3.8 ANALISIS DATA	62
3.8.1 <i>Data Reduction</i> (Reduksi Data).....	63
3.8.2 <i>Data Display</i> (Penyajian Data).....	63
3.8.3 <i>Conclusion Drawing</i> atau <i>Verification</i>	63
BAB IV HASIL PENELITIAN	65
4.1 GAMBARAN UMUM.....	69
4.1.1 SD X Kota Yogyakarta.....	65
4.1.2 SD Y Kabupaten Sleman	71
4.2 HASIL PENELITIAN.....	77
4.2.1 Karakteristik Informan.....	77
4.2.2 Gambaran Penerapan Kebijakan Sekolah Dasar Siaga Bencana	80
BAB V PEMBAHASAN	105
5.1 PEMBAHASAN.....	105
5.1.1 Visi Misi.....	106

5.1.2 Peraturan/Kesepakatan.....	108
5.1.3 Penganggaran	111
5.1.4 Program Kegiatan/Perencanaan	113
5.1.5 Monitoring dan Evaluasi.....	116
5.2 HAMBATAN	118
BAB VI SIMPULAN DAN SARAN	119
6.1 SIMPULAN.....	119
6.2 SARAN	122
6.2.1 Pihak Sekolah.....	122
6.2.2 BPBD	122
6.2.3 Dinas Pendidikan.....	123
6.2.4 Peneliti Selanjutnya	123
DAFTAR PUSTAKA.....	124
LAMPIRAN.....	129

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Keaslian Penelitian	10
Tabel 4.1 Jumlah Siswa SD X berdasarkan Jenis Kelamin	67
Tabel 4.2 Jumlah Tenaga Pendidikan dan Non Pendidikan SD X	68
Tabel 4.3 Struktur Kurikulum Tingkat SD di SD X	68
Tabel 4.4 Penyediaan Sarana di SD X	69
Tabel 4.5 Penyediaan Prasarana di SD Y	70
Tabel 4.6 Jumlah Siswa SD Y berdasarkan Jenis Kelamin	71
Tabel 4.7 Jumlah Tenaga Pendidikan dan Non Pendidikan SD Y	73
Tabel 4.8 Struktur Kurikulum Tingkat SD di SD Y	74
Tabel 4.9 Penyediaan Sarana di SD Y	74
Tabel 4.10 Penyediaan Prasarana di SD Y	75
Tabel 4.11 Karakteristik Informan dari Pihak Sekolah	76
Tabel 4.12 Karakteristik Informan Dinas Pendidikan	77
Tabel 4.13 Karakteristik Informan BPBD	78
Tabel 4.14 Indikator Visi dan Misi	79
Tabel 4.15 Indikator Peraturan/ Kesepakatan	80
Tabel 4.16 Indikator Penganggaran	82
Tabel 4.17 Indikator Program Kegiatan/Perencanaan	86
Tabel 4.18: Indikator Monitoring dan Evaluasi	92
Tabel 4.19 Rekapitulasi Hasil Observasi SD X Kota Yogyakarta	95
Tabel 4.20 Rekapitulasi Hasil Observasi SD Y Kabupaten Sleman	100

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.7 Kerangka Teori.....	48
Gambar 3.1 Alur Pikir.....	50
Gambar 4.1 Kondisi Sekolah SD X Kota Yogyakarta.....	66
Gambar 4.2 Kondisi Sekolah SD Y Kabupaten Sleman.....	72

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 <i>Mapping Instrument</i>	129
Lampiran 2 Panduan Wawancara Pihak 1: Kepala Sekolah	132
Lampiran 3 Panduan Wawancara Pihak 2: Guru Penanggung Jawab SSB	140
Lampiran 4 Panduan Wawancara Pihak 3: Komite Sekolah.....	148
Lampiran 5 Panduan Wawancara Pihak 4: Dinas Pendidikan	151
Lampiran 6 Panduan Wawancara Pihak 5: BPBD	154
Lampiran 7 Lembar Studi Dokumen	157
Lampiran 8 Lembar Studi Observasi	159
Lampiran 9 Data Mentah Hasil Penelitian SD X Kota Yogyakarta	160
Lampiran 10 Data Mentah Hasil Penelitian SD Y Kabupaten Sleman	174
Lampiran 11 Dokumentasi	189

DAFTAR ISTILAH

APBN	: Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
APBD	: Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
BNPB	: Badan Nasional Penanggulangan Bencana
BPBD	: Badan Penanggulangan Bencana Daerah
COMPRESS	: <i>Community Preparedness</i>
CSS	: <i>Children Science Support</i>
DIY	: Daerah Istimewa Yogyakarta
IOD	: <i>Indian Ocean Dipole</i>
ISDR	: <i>International Strategy for Disaster Reduction</i>
KLB	: Kejadian Luar Biasa
KPBI	: Konsorsium Pendidikan Bencana Indonesia
KTSP	: Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan
LIPI	: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
PMI	: Palang Merah Indonesia
PP	: Peraturan Pemerintah
PRB	: Pengurangan Resiko Bencana
PRBBS	: Pengurangan Resiko Bencana Berbasis Sekolah
RAS	: Rencana Aksi Sekolah
SARA	: Suku, Agama, & Ras
SK	: Surat Keputusan
SOP	: Standar Operasional Prosedur
SSB	: Sekolah Siaga Bencana
UNDP	: <i>United Nations Development Program</i>
UU	: Undang-Undang

UNISDR : *United Nation Secretariat for International Strategy for
Disaster Reduction*

DAFTAR DOKUMENTASI

Gambar 1: Kotak P3K di SD Y Kabupaten Sleman.....	189
Gambar 2: Kotak P3K di SD X Kota Yogyakarta	189
Gambar 3: Wawancara dengan Pihak Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta.....	189
Gambar 4: Struktur Tim Pelaksana UKS SD Y Kabupaten Sleman.....	189
Gambar 5: Wawancara dengan Pihak BPBD Kota Yogyakarta	190
Gambar 6: Papan Informasi Antisipasi Bencana di SD X Kota Yogyakarta	190
Gambar 7: Titik Kumpul di SD X Kota Yogyakarta	190
Gambar 8: Titik Kumpul di SD Y Kabupaten Sleman.....	190

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Bencana memang tidak dapat diprediksi kedatangannya, tidak bisa dicegah, serta tidak bisa ditolak. Bencana merupakan peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam, faktor non-alam maupun faktor manusia, dimana hal tersebut mengakibatkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis (Undang-Undang No. 24 Tahun 2007). Adanya bencana mengakibatkan banyak korban jiwa, harta, kerusakan bangunan, serta munculnya wabah penyakit. Berbagai dampak tersebut tentu akan memunculkan traumatis yang tinggi bagi masyarakat terutama bagi anak-anak generasi penerus bangsa. Penanggulangan bencana akan berhasil dengan baik jika semua menyadari risiko bencana yang ada serta memiliki kemampuan untuk mengantisipasi bencana atau yang lebih dikenal dengan kesiapsiagaan terhadap bencana.

Di dunia telah terjadi gempa bumi sebanyak 504 kali selama rentang waktu 2000-2017. Di Eropa pada tahun 2000-2017 terjadi 891 bencana alam, dimana 34 kali terjadi gempa bumi (rata-rata 5,7 skala richter) yang mempengaruhi 13 negara lain, terutama Italy dan Greece yang mengakibatkan 701 orang meninggal dan 257.303 orang terdampak (Crunch, 2018). Diperkirakan sekitar 175 juta anak per tahun terkena dampak bencana alam yang disebabkan oleh perubahan iklim (Codreanu, Celenza, & Jacobs, 2014). Berdasarkan data dari BNPB di Indonesia

selama tahun 2017 terdapat 2.853 kejadian bencana, sedangkan selama tahun 2018 terdapat 2.572 kejadian bencana, dan terjadi penurunan sebanyak 281 (9,8%) dari tahun sebelumnya. BNPB juga mencatat bahwa dampak yang ditimbulkan selama tahun 2017 adalah sebanyak 360 korban jiwa meninggal dan hilang, 1.042 luka-luka, dan 3.674.168 terdampak dan mengungsi, sedangkan pada tahun 2018 sebanyak 4.814 korban jiwa meninggal dan hilang, 21.083 luka-luka, dan 10.303.309 terdampak dan mengungsi. Pada tahun 2017 sebanyak 49.731 unit rumah rusak dimana 10.542 rusak berat, 10.648 rusak sedang, dan 28.631 rusak ringan, sedangkan pada tahun 2018 sebanyak 320.165 unit rumah rusak dimana 150.513 rusak berat, 39.815 rusak sedang, dan 129.837 rusak ringan. Terdapat perbedaan yang sangat signifikan dari tahun sebelumnya yaitu jumlah unit rumah yang rusak meningkat sebanyak 270.434 (BNPB, 2019).

Selain itu, dampak yang ditimbulkan pada tahun 2017 adalah rusaknya 117 fasilitas kesehatan, 715 fasilitas peribadatan, dan 1.326 fasilitas pendidikan, sedangkan pada tahun 2018 adalah rusaknya 106 fasilitas kesehatan, 857 fasilitas peribadatan, dan 1.736 fasilitas pendidikan (BNPB, 2018). Jumlah kejadian bencana pada tahun 2018 memang terjadi penurunan dibanding tahun 2017, namun dampak yang ditimbulkan jauh lebih besar dari tahun 2017. Data sementara milik BNPB menyebutkan, gempa Lombok telah mengakibatkan 606 gedung sekolah mengalami kerusakan di Nusa Tenggara Barat (NTB). Sekitar 3.051 ruang kelas di ratusan sekolah itu mengalami kerusakan, 1.460 di antaranya rusak berat (Idhom, 2018). Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhajir Effendy menyampaikan ada 2.736 gedung sekolah yang terdampak gempa Palu, Sulawesi

Tengah. Gedung sekolah yang paling banyak terdampak terdapat di Kabupaten Sigi (Kusuma, 2018).

Berdasarkan data dari BNPB di Provinsi DIY pada tahun 2017 telah terjadi 24 kejadian bencana, sedangkan pada tahun 2018 terdapat 25 kejadian bencana, terjadi peningkatan sebanyak 4,1%. BNPB juga mencatat bahwa dampak yang ditimbulkan selama tahun 2017 yaitu sebanyak 15 korban jiwa meninggal dan hilang, 17 luka-luka, dan 135,759 terdampak dan mengungsi, sedangkan pada tahun 2018 sebanyak 2 korban jiwa meninggal dan hilang, 5 luka-luka dan 142,507 terdampak dan mengungsi. Pada tahun 2017 sebanyak 13 rumah rusak berat, 5 rusak sedang, dan 74 rusak ringan, sedangkan pada tahun 2018 sebanyak 7 rumah rusak berat, 6 rusak sedang, dan 212 rusak ringan. Selain itu dampak yang ditimbulkan pada tahun 2017 adalah rusaknya 1 fasilitas peribadatan dan 3 fasilitas pendidikan, sedangkan pada tahun 2018 sebanyak 4 fasilitas peribadatan dan 5 fasilitas pendidikan mengalami kerusakan (BNPB, 2019).

Berbagai upaya dilakukan untuk mengurangi resiko bencana, salah satunya dengan pembuatan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Menurut undang-undang tersebut, upaya pengurangan resiko bencana harus dimasukkan ke dalam program pembangunan termasuk dalam bidang pendidikan. Melalui Surat Edaran Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70a/MPN/SE/2010, Menteri Pendidikan Nasional menghimbau kepada seluruh kepala daerah di Indonesia untuk melaksanakan strategi pengarusutamaan pengurangan risiko bencana di sekolah baik secara struktural maupun non-struktural guna mewujudkan budaya kesiapsiagaan dan keselamatan terhadap

bencana di sekolah. Kebijakan di tingkat sekolah akan lebih mudah dibuat dan dikembangkan apabila telah ada landasan kebijakan yang telah dilakukan oleh Dinas Pendidikan di tingkat Provinsi atau Kabupaten/Kota (LIPI, 2013).

Pendidikan siaga bencana penting bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia, terutama mengenalkannya sejak dini di sekolah. Karena Indonesia termasuk dalam negara yang paling rawan terkena bencana alam di dunia demikian menurut *United International Strategy for Disaster Reduction* (UNISDR). Belajar dari pengalaman tentang kejadian bencana alam yang besar dan berbagai bahaya yang ada di Indonesia maka dipandang perlu untuk mengajarkan kepada masyarakat Indonesia tentang Siaga Bencana. Hal ini dapat dimulai dengan Pendidikan Siaga Bencana pada siswa di sekolah tentang bagaimana menyelamatkan diri mereka saat bencana mengancam dan menghindari kecelakaan.

Untuk menjadi Sekolah Siaga Bencana (SSB) terdapat empat poin parameter yang harus dipenuhi yaitu sikap dan tindakan, kebijakan sekolah, perencanaan kesiapsiagaan, dan mobilisasi sumber daya. Parameter kebijakan sekolah meliputi visi misi, peraturan, kegiatan (pelatihan, pemberian informasi, dan peningkatan pengetahuan). Selain itu adanya surat atau dokumen yang menyatakan adanya alokasi anggaran/dana untuk kegiatan kesiapsiagaan bencana di sekolah, sebaiknya melibatkan komite sekolah dan Dinas Pendidikan daerah yang berperan sebagai pengawas dalam pengelolaan sekolah (Konsorsium Pendidikan Bencana Indonesia, 2011; LIPI, 2013).

Kebijakan pada dasarnya adalah bentuk dukungan secara formal dari pimpinan sekolah yang dituangkan dalam peraturan sekolah dan kesepakatan mengenai hal yang harus dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan. Kebijakan sekolah adalah keputusan yang dibuat secara formal oleh sekolah mengenai hal-hal yang perlu didukung dalam pelaksanaan PRB di sekolah, baik secara khusus maupun terpadu. Keputusan tersebut bersifat mengikat. Pada praktiknya, kebijakan sekolah akan landasan, panduan, arahan pelaksanaan kegiatan terkait dengan PRB di sekolah. Kebijakan terkait kesiapsiagaan bencana akan sangat berpengaruh karena merupakan upaya konkrit dalam pelaksanaan kegiatan siaga bencana, yang meliputi; pendidikan publik, *emergency planning*, sistem peringatan dini bencana dan mobilisasi sumberdaya. Kebijakan perlu dijabarkan dalam jenis-jenis kebijakan untuk mengantisipasi bencana, seperti organisasi pengelola bencana, rencana aksi untuk tanggap darurat, sistem peringatan bencana, pendidikan, dan alokasi bencana. Kebijakan di sekolah siaga bencana berupa Standar Operasional Prosedur (SOP) yang wajib dimiliki sekolah (LIPI UNESCO/ISDR, 2006).

Di mulai pasca tsunami Aceh melalui Program *Community Preparedness* (COMPRESS) LIPI melakukan sosialisasi kesiapsiagaan menghadapi bencana dengan sasaran anak-anak khususnya di sekolah melalui kegiatan *children science support-CSS* (dukungan ilmu pengetahuan untuk kesiapsiagaan bencana). Tahun 2008 saat berkegiatan di Kota Bengkulu, kegiatan CSS berkembang dan COMPRESS-LIPI mulai merintis upaya kesiapsiagaan di seluruh komponen komunitas sekolah dengan sebuah konsep “sekolah siaga bencana” berlandaskan kerangka kerja (*framework*) kesiapsiagaan LIPI-UNESCO/ISDR (LIPI, 2013).

SD Negeri Selomulyo Sleman merupakan salah satu sekolah yang sudah menerapkan SSB sejak tahun 2017. Penetapan tujuan program SSB termuat dalam Kebijakan Penanggulangan Bencana yang ada dalam Rencana Aksi Sekolah (RAS). Didalam Kebijakan Penanggulangan Bencana terdapat Visi dan Misi, dalam merumuskan visi penanggulangan bencana sekolah diintegrasikan dengan visi dan misi sekolah. Visi sekolah khususnya dalam penanggulangan bencana “tidak terjadi korban akibat bencana yang terjadi di sekolah”. Namun dalam visi dan misi sekolah belum dimunculkan sub terkait SSB, karena visi dan misi sekolah dibuat tahun 2014 dan berlaku sampai dengan tahun 2018, dan sekolah baru menjadi SSB tahun 2017. Kemungkinan akan dimunculkan pada pembaharuan tahun 2019 (Nuraini, 2018).

Peraturan dapat berupa Surat Keputusan (SK) pembentukan Gugus Siaga Bencana di sekolah. Dalam SK ini tertulis komponen sekolah apa saja yang masuk ke dalam beberapa kelompok gugus siaga bencana. SK ini juga menjelaskan tugas pokok dan fungsi dari tiap kelompok gugus siaga bencana ketika sebelum terjadi bencana, saat terjadi bencana dan setelah terjadi bencana (LIPI, 2013).

Dalam sektor pendidikan, pemerintah telah mengalokasikan 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan mendorong adanya alokasi 1% Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk pengurangan resiko bencana, serta 20% untuk alokasi pendidikan sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 tahun 2003 (Konsorsium Pendidikan Bencana Indonesia, 2011). Menteri

Keuangan Sri Mulyani mengatakan, bahwa pada tahun 2019 pemerintah mengalokasikan Rp15 triliun untuk anggaran bencana. Angka ini naik dua kali lipat dari tahun lalu, di mana pemerintah mengalokasikan dana hanya Rp7 triliun (Intan, 2019). Dirjen Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum Mohammad Hasan mengatakan jika Negara Jepang dalam mengatasi banjir mengalokasikan dana APBN-nya sebesar 0,47 persen dari total anggaran pendapatan. Bahkan pemerintah Jepang pada tahun 1960-an ketika sedang mengatasi permasalahan banjir di negara tersebut pernah mengalokasikan dana hingga 6,7 persen dari APBN. Sementara Indonesia hanya 0,24 persen dari APBN, dimana tingkat kesulitan dan area bencana dinilai jauh lebih besar di Indonesia dibandingkan Jepang (Suara Pembaruan, 2014). Untuk membentuk sekolah siaga bencana, pada tahun anggaran 2017 BPBD Bantul mengalokasikan sekitar 300 juta dimana tiap pembentukan sekolah siaga bencana anggarannya 75 juta (Sidik, 2017).

DIY dan wilayah Sleman khususnya mengalami dampak erupsi Gunung Merapi sehingga menyebabkan korban jiwa, luka-luka, kerusakan infrastruktur dan kepanikan warga termasuk warga sekolah didalamnya. Pengalaman traumatis ini menunjukkan dengan jelas bahwa tanggapan yang efektif terhadap kebutuhan warga sekolah di awal tergantung pada tingkat kesiapan dan perencanaan sekolah, serta kemampuan dan ketersediaan sumber daya yang ada (Nuraini, 2018).

Monitoring dan evaluasi siaga bencana dapat dilakukan oleh pihak internal maupun eksternal sekolah. Internal sekolah dapat dilakukan oleh Kepala Sekolah atau Wakil maupun guru yang diberi mandat untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi ini. Adapun pihak eksternal yang dapat melakukan monitoring dan

evaluasi sekolah siaga bencana ini antara lain pengawas sekolah atau dari dinas pendidikan daerah setempat, penyandang dana dari program pembentukan sekolah siaga bencana itu sendiri, bahkan perguruan tinggi setempat.

Berdasarkan data dari Bappeda Provinsi DIY, jumlah Sekolah Dasar (SD) di Provinsi DIY pada tahun 2018 sebanyak 1.840, dimana terbagi menjadi dua yaitu Sekolah Dasar Negeri (SDN) sebanyak 1.436 dan Sekolah Dasar Swasta sebanyak 404 (bappeda.jogjaprov.go.id). Sedangkan untuk Sekolah Dasar yang sudah menerapkan Sekolah Siaga Bencana (SSB) hanya 39, yaitu di Kabupaten Sleman 28 SD, Kabupaten Kulon Progo 4 SD, Kabupaten Gunungkidul 1 SD, Kabupaten Bantul 3 SD, dan Kota Yogyakarta 3 SD. Angka ini sangat jauh dari harapan karena kesiapsiagaan saat terjadi bencana sangat diperlukan. Untuk itu perlu dilakukan peningkatan penerapan Sekolah Siaga Bencana.

Syarat minimal menuju sekolah siaga bencana adalah kebijakan dari Kepala Sekolah dan komunitas sekolah, dukungan dari Dinas Pendidikan di wilayahnya, dukungan dari organisasi terkait pengurangan risiko bencana, melakukan penguatan kapasitas pengetahuan dan keterampilan bagi guru dan siswa sekolah, melakukan latihan berkala yang jelas dan terukur, dan adanya keterlibatan dukungan menerus dari Dinas Pendidikan dan organisasi terkait PRB, termasuk dalam proses pemantauan dan evaluasi sekolah (UNESCO).

Berdasarkan uraian diatas diketahui bahwa masih banyak Sekolah Dasar di Yogyakarta yang belum menerapkan Sekolah Siaga Bencana maka perlu dilakukan penelitian terkait gambaran penerapan kebijakan sekolah siaga bencana

tingkat Sekolah Dasar di Yogyakarta karena salah satu syarat minimal menuju Sekolah Siaga Bencana adalah kebijakan Kepala Sekolah dan komunitas sekolah.

1.2 RUMUSAN MASALAH

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah “Bagaimana Gambaran Penerapan Kebijakan Sekolah Siaga Bencana Tingkat Sekolah Dasar di Yogyakarta Tahun 2019?”

1.3 TUJUAN

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran penerapan kebijakan sekolah siaga bencana tingkat Sekolah Dasar di Yogyakarta tahun 2019.

1.4 MANFAAT

1.4.1 Bagi Sekolah Dasar

Dapat memberikan informasi mengenai gambaran penerapan kebijakan sekolah siaga bencana tingkat Sekolah Dasar di Yogyakarta.

1.4.2 Bagi Jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat

1. Penelitian ini dapat menambah pustaka atau referensi pembelajaran di Jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat UNNES mengenai penerapan Kebijakan Sekolah Siaga Bencana tingkat Sekolah Dasar di Yogyakarta.
2. Penelitian ini dapat dijadikan acuan untuk penelitian selanjutnya.

1.4.3 Bagi Peneliti

1. Penelitian ini dapat menambah pengetahuan mengenai penerapan kebijakan Sekolah Siaga Bencana tingkat Sekolah Dasar di Yogyakarta.

2. Penelitian ini dapat menambah pengalaman mengenai gambaran penerapan kebijakan Sekolah Siaga Bencana tingkat Sekolah Dasar di Yogyakarta.

1.5 KEASLIAN PENELITIAN

Keaslian penelitian ini diperoleh dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Dimas Ayu Novalita tahun 2018, Sevita Dwi Nuraini tahun 2018 dan Ardhita Sinar Perwira tahun 2016.

Tabel 1.1: Keaslian Penelitian

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Rancangan Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Dimas Ayu Novalita (Novalita, 2018)	Kesiapsiagaan Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Cilacap dalam Menghadapi Bencana di Kabupaten Cilacap	Deskriptif Kuantitatif	Kebijakan, Perencanaan Kesiapsiagaan, Mobilisasi Sumber Daya	Dari 30 indikator terdiri dari kebijakan sekolah dengan jumlah 4 indikator; perencanaan kesiapsiagaan dengan 17 indikator; dan mobilisasi sumber daya dengan 9 indikator menghasilkan bahwa sebesar 13,33% (4 indikator) sudah diterapkan dan sebesar 86,67% (26 indikator) yang belum diterapkan.
2.	Sevita Dwi Nuraini (Nuraini, 2018)	Manajemen Program Sekolah Siaga Bencana di	Deskriptif kualitatif.	Perencanaan, Pelaksanaan, dan Evaluasi Program SSB	Perencanaan program SSB di SD Negeri Selomulyo Ngaglik

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		SD Negeri Selomulyo Ngaglik Sleman			Sleman meliputi kegiatan penetapan tujuan, perencanaan kurikulum, perencanaan personil/tenaga ahli, perencanaan sarana dan prasarana, dan perencanaan anggaran.
3.	Arditha Sinar Perwira (Perwira,2 016)	Efektivitas Program Sekolah Siaga Bencana sebagai Strategi BPBD DIY dalam Pengurangan Resiko Bencana di Kota Yogyakarta	Deskriptif kualitatif	Ketepatan sasaran, Sosialisasi program, Tujuan program, dan Pemantauan program	Pelaksanaan program SSB di Kota Yogyakarta belum efektif dilihat dari 4 indikator: Ketepatan sasaran, Sosialisasi program, Tujuan program, Pemantauan program, yang didukung oleh temuan data dalam penelitian ini, bahwa: tidak siapnya siswa SD sebagai sasaran program untuk menyebarkan informasi, kurang mendalamnya materi sosialisasi program SSB kepada para guru, belum

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
					terwujudnya aspek afektif dan psikomotorik siswa dalam mewujudkan pengurangan risiko bencana, tidak lengkapnya dokumen kesiapsiagaan di sekolah, dan sistem pemantuan program yang kurang efektif.

Dari keaslian penelitian diatas, terdapat beberapa hal yang membedakan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya meliputi:

1. Tempat penelitian, yaitu di Sekolah Dasar di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Sasaran penelitian terhadap pengambil kebijakan tingkat Sekolah Dasar.

1.6 RUANG LINGKUP PENELITIAN

1.6.1 Ruang Lingkup Tempat

Penelitian di lakukan di Sekolah Dasar yang sudah menerapkan Sekolah Siaga Bencana di Yogyakarta.

1.6.2 Ruang Lingkup Waktu

Penyusunan Skripsi dilakukan pada bulan Januari-September.

1.6.3 Ruang Lingkup Keilmuan

Kajian yang diteliti termasuk dalam bidang Ilmu Kesehaan Masyarakat dengan kajian Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang membahas mengenai

gambaran penerapan kebijakan Sekolah Siaga Bencana tingkat Sekolah Dasar di Yogyakarta.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 LANDASAN TEORI

2.1.1 Bencana

Bencana dapat didefinisikan dalam berbagai arti baik secara normatif maupun pendapat para ahli. Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis (Republik Indonesia, 2007).

Menurut *United Nations Development Program* (UNDP), bencana adalah suatu kejadian yang ekstrem dalam lingkungan alam atau manusia yang secara merugikan mempengaruhi kehidupan manusia, harta benda atau pada aktivitas yang menimbulkan bencana (Ramli, 2010).

Sehingga dapat disimpulkan bahwa bencana merupakan suatu peristiwa baik tunggal maupun rangkaian yang dapat menimbulkan ancaman, gangguan dan merugikan bagi kelangsungan hidup masyarakat, disebabkan oleh berbagai faktor yang berasal dari alam, non alam maupun manusia itu sendiri.

Jenis-jenis bencana menurut Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, yaitu:

2.1.2 Bencana Sosial

Bencana sosial disebabkan oleh ulah manusia, seperti: konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror (UU No 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana).

2.1.2.1 Konflik Sosial

Konflik Sosial atau kerusuhan sosial adalah suatu gerakan massal yang bersifat merusak tatanan dan tata tertib sosial yang ada, yang dipicu oleh kecemburuan sosial, budaya dan ekonomi yang biasanya dikemas sebagai pertentangan antar suku, agama, ras (SARA) (BNPB, 2017).

Kondisi sosial budaya masyarakat Indonesia yang terdiri dari beraneka ragam suku, ras, golongan, bahasa, agama dan etnis merupakan salah satu aset nasional yang bernilai tinggi sekaligus merupakan kondisi yang sangat rawan. Kondisi ini sering dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang mempunyai kepentingan tertentu untuk memulai terjadinya konflik. Kerawanan terhadap konflik dalam masyarakat Indonesia diperburuk dengan tingginya kesenjangan ekonomi dalam masyarakat serta rendahnya kualitas pendidikan masyarakat. Hal ini juga terkait dengan menurunnya rasa nasionalisme dalam masyarakat seperti yang terjadi di beberapa daerah yang ingin melepaskan diri dari NKRI. Sejak awal tahun 1999 sampai beberapa tahun terakhir telah terjadi konflik vertikal dan horizontal di beberapa daerah di Indonesia yang ditandai dengan timbulnya kerusuhan sosial, misalnya di Kabupaten Sambas (Provinsi Kalimantan Barat), Provinsi Maluku dan Maluku Utara, Provinsi Aceh, Provinsi Papua, Kabupaten Poso (Provinsi Sulawesi Tengah) dan berbagai daerah lainnya. Kerusuhan sosial

ini telah mengakibatkan lebih dari 1 juta jiwa orang di 20 provinsi terpaksa meninggalkan kediamannya. Meskipun saat ini masalah pengungsi sebagian besar telah teratasi, potensi berulangnya bencana ini akibat konflik sosial baru bisa sewaktu-waktu terjadi. Kesiapan dan kewaspadaan perlu untuk dapat mengurangi terjadinya risiko tersebut (Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana 2006-2009).

2.1.3 Bencana Non Alam

Bencana non alam disebabkan oleh peristiwa non alam, seperti: gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi (wabah penyakit) (UU No 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana).

2.1.3.1 Gagal Teknologi

Menurut UNISDR, gagal teknologi adalah semua kejadian bencana yang diakibatkan oleh kesalahan desain, pengoperasian, kelalaian dan kesengajaan manusia dalam penggunaan teknologi dan/atau industri. Kegagalan teknologi dapat menyebabkan pencemaran (udara, air, dan tanah), korban jiwa, kerusakan bangunan, dan kerusakan lainnya. Bencana gagal teknologi pada skala yang besar akan dapat mengancam kestabilan ekologi secara global. Peningkatan bidang industri dan perkembangan teknologi yang pesat membuat sudah waktunya industri di Indonesia dikelola sedemikian rupa guna mengurangi risiko tersebut. Fenomena semburan lumpur di Sidoarjo yang terjadi pada akhir Mei 2006 di lokasi dimana PT. Lapindo Brantas Inc. melakukan kegiatan pengeboran adalah sebuah contoh dampak negatif dari kegiatan industri serta bentuk bencana yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Berdasarkan hasil kajian risiko, total

jumlah jiwa terpapar risiko Kegagalan Teknologi di Indonesia adalah sebanyak 19.585.257 jiwa di seluruh Provinsi di Indonesia dengan potensi kerugian mencapai Rp. 4.697 trilyun (Rencana Nasional Penanggulangan Bencana 2015-2019).

2.1.3.2 Epidemi (Wabah Penyakit)

Wabah adalah kejadian berjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi dari pada keadaan yang lazim pada waktu dan daerah tertentu serta dapat menimbulkan malapetaka (Undang-Undang No. 4 Tahun 1984). Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular, disebutkan bahwa KLB adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan atau kematian yang bermakna secara epidemiologis pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu, dan merupakan keadaan yang menjurus pada terjadinya wabah. KLB sering digunakan sebagai istilah lain dari wabah namun dalam skala yang lebih sempit di tingkat kabupaten/kota atau provinsi, jumlah kejadian penyakit yang lebih sedikit, daerah yang lebih sempit dan waktu yang lebih singkat serta dampak yang ditimbulkan lebih ringan dibandingkan wabah. Penetapan status KLB dibuat oleh kepala daerah setempat sedangkan wabah ditetapkan oleh menteri kesehatan dikarenakan wabah mencakup beberapa provinsi di Indonesia. Batasan KLB antara lain:

1. Semua jenis penyakit baik penyakit infeksi akut, kronis maupun penyakit non infeksi;

2. Untuk penyakit endemis (penyakit yang selalu ada pada keadaan biasa) maka disebut KLB jika suatu peningkatan jumlah kasus yang melebihi keadaan biasa pada waktu dan daerah tertentu;
3. Untuk *re-emerging* dan *emerging disease*, disebut KLB jika suatu episode penyakit dan timbulnya penyakit pada dua atau lebih penderita yang berhubungan satu sama lain;
4. Tidak ada batasan yang spesifik mengenai luas daerah yang terkena KLB, tergantung dari cara penularan penyakit;
5. Waktu yang digunakan untuk menentukan lamanya KLB sangat bervariasi namun dapat digunakan masa inkubasi dan masa penularan penyakit untuk mengetahui lamanya status KLB (Hasmi, 2011).

2.1.4 Bencana Alam

Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor (UU No. 24 Tahun 2007).

2.1.4.1 Gempa Bumi

Gempa bumi adalah getaran atau guncangan yang terjadi di permukaan bumi yang disebabkan oleh tumbukan antar lempeng bumi, patahan aktif, aktivitas gunungapi, atau runtuh batuan. Selain proses alami tersebut, terdapat pula gempa bumi buatan yang disebabkan oleh aktivitas manusia, seperti peledakan dinamit dan nuklir (Rijanta, dkk., 2014).

Risiko bencana gempa bumi di Indonesia secara umum berada dalam kategori sedang hingga tinggi. Tingkat risiko yang tinggi ini dipengaruhi oleh kedekatan berbagai daerah tersebut dengan zona pertemuan lempeng yang sangat aktif (Rijanta, dkk., 2014).

Secara geografis Indonesia terletak pada rangkaian cincin api yang membentang sepanjang lempeng pasifik yang merupakan lempeng tektonik paling aktif di dunia. Proses terjadinya gempa sangat sulit untuk diamati secara langsung, sebab melibatkan interaksi yang sangat kompleks antara materi dan energi yang terdapat pada sistem sesar aktif di bawah permukaan bumi. Demikian proses ini juga sangat sulit untuk diprediksi. Pada wilayah tertentu, aktivitas kegempaan dapat diam selama ratusan atau bahkan ribuan tahun, namun tiba-tiba terjadi dengan melepaskan energi besar yang dapat merusak lingkungan alami maupun buatan. Hal ini menunjukkan dibutuhkan adanya rencana mitigasi bencana gempa sehingga bisa meminimalisir kerugian yang akan terjadi. Beberapa dampak gempa bumi beserta bahaya susulannya (seperti tsunami, keretakan tanah, dan kelongsoran lereng) yang ditimbulkan oleh gempa bumi (Amri, dkk., 2016).

Dampak gempa bumi dikelompokkan menjadi dua (Hartuti, 2009), berupa:

2.1.4.1.1 Dampak Primer

Dampak primer yaitu dampak yang diakibatkan oleh getaran gempa itu sendiri. Jika getaran gempa cukup besar saat sampai ke permukaan bumi maka akan mengakibatkan dampak, berupa:

1. Dapat merusak bangunan dan infrastruktur lainnya.
2. Banyak orang yang meninggal karena keruntuhan bangunan rumahnya sendiri.

3. Banyak orang kehilangan harta bendanya yang ikut tertimbun dalam reruntuhan bangunan.

2.1.4.2 Dampak Sekunder

Dampak sekunder yaitu dampak lain yang di picu adanya gempa, misalnya terjadinya tsunami, tanah longsor, tanah yang menjadi cairan kental (*liquefaction*), terjadi kebakaran, penyakit yang menyebar, dan sebagainya.

2.1.4.2 Tsunami

Secara etimologi, istilah tsunami berasal dari bahasa Jepang, *Tsu* yang berarti pelabuhan dan *name* yang berarti gelombang. Sehingga tsunami diartikan sebagai peristiwa datangnya gelombang laut yang tinggi dan besar ke daerah pinggir pantai beberapa saat setelah terjadi gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tanah longsor di dasar laut. Tsunami juga dapat terjadi karena adanya meteorit yang jatuh ke bumi (Hartuti, 2009).

Tsunami merupakan salah satu ancaman bencana untuk banyak wilayah pesisir di Indonesia. Bencana ini umumnya dipicu oleh terjadinya gempabumi di laut yang menyebabkan pergeseran secara vertikal di dasar laut (Amri, dkk., 2016). Gelombang tsunami ini bergerak dari dasar laut hingga permukaan laut. Gelombang ini juga akan membawa material dasar laut yang biasanya mengandung lumpur berwarna hitam pekat. Gelombang besar yang memiliki kekuatan sangat besar ini secara simultan dan bersamaan bergerak cepat menghantam pelabuhan atau pantai terdekat atau jauh sekali pun tergantung kekuatan tsunami yang dimilikinya. Bahan dasar laut atau lumpur dari dasar laut yang ikut tersapu dan terdorong oleh gelombang tsunami semakin menambah

kekuatan tsunami sehingga kerusakan yang ditimbulkan sangat besar (Hartuti, 2009).

Mengingat begitu luasnya wilayah administratif, jumlah penduduk yang besar, dan banyaknya infrastruktur yang terpapar di kawasan rawan tsunami, penanggulangan bencana tsunami di Indonesia perlu dilakukan dengan lebih komprehensif dan berkelanjutan. Menyadari tingginya ancaman dan kerentanan terhadap tsunami, Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan ketangguhan bangsa dalam menanggulangi tsunami (Amri, dkk., 2016).

Dampak negatif yang ditimbulkan tsunami adalah merusak apa saja yang dilaluinya seperti bangunan, tumbuh-tumbuhan, dan manusia akan menjadi korbannya. Selain itu, tsunami juga akan menyebabkan genangan air dimana-mana, serta pencemaran air asin pada lahan pertanian, tanah, dan air bersih (Hartuti, 2009).

2.1.4.3 Gunung Api

Gunung api adalah istilah yang didefinisikan sebagai suatu saluran fluida panas (batuan dalam wujud cair atau lava) yang memanjang dari kedalaman sekitar 10 km di bawah permukaan bumi sampai ke permukaan bumi, termasuk endapan hasil akumulasi material yang dikeluarkan saat dia meletus. Secara singkat, gunungapi adalah gunung yang masih aktif dalam mengeluarkan material di dalamnya (Hartuti, 2009).

Peta risiko bencana letusan gunungapi Indonesia dapat dipahami bahwa rangkaian gunungapi ini memanjang dari pantai timur Pulau Sumatera dan

berlanjut hingga bagian tengah Pulau Jawa, Bali dan Nusa Tenggara. Deretan gunungapi lainnya berada di Provinsi Sulawesi Utara dan Maluku Utara yang memanjang hingga Filipina (Rijanta, dkk., 2014).

Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah gunungapi aktif terbanyak di dunia. Gunung apitersebut merupakan bagian dari rangkaian pegunungan api aktif yang dikenal dengan sebutan *ring of fire*. Letusan gunungapi merupakan bagian dari aktivitas vulkanik yang di kenal dengan istilah erupsi. Bahaya letusan gunungapi berupa awan panas, lontaran material (pijar), hujan abu lebat, lava, gas racun, tsunami, dan banjir lahar. Aliran awan-panas mampu menghanguskan tumbuh-tumbuhan, berbahaya bagi manusia dan hewan, serta merusak paru-paru (Rijanta, dkk., 2014).

2.1.4.4 Banjir

Banjir adalah peristiwa atau keadaan terendamnya suatu daerah atau daratan karena volume air yang meningkat. Bencana banjir dapat terjadi dikarenakan masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk tidak tinggal di pinggir sungai. Selain itu, berbagai permasalahan lingkungan mulai dari tingkatan global hingga lokal, misalnya perubahan iklim, kurangnya daerah resapan air di daerah hulu, tingginya daerah terbangun di daerah hilir, dan rendahnya kesadaran masyarakat untuk menjaga kebersihan sungai turut menambah frekuensi terjadinya banjir di berbagai daerah di Indonesia (Rijanta, dkk., 2014).

Menurut BNPB (2012), peta risiko bencana banjir di Indonesia dalam kategori rendah hingga tinggi (Rijanta, dkk., 2014). Menurut Sastrodihardjo (2012), banjir dapat disebabkan oleh kondisi alam yang statis seperti geografis, topografis, dan geometri alur sungai. Peristiwa alam yang dinamis seperti curah

hujan yang tinggi, pembendungan dari laut/pasang pada sungai induk, amblesan tanah dan pendangkalan akibat sedimentasi, serta aktivitas manusia yang dinamis seperti adanya tata guna di lahan dataran banjir yang tidak sesuai, yaitu dengan mendirikan pemukiman di bantaran sungai, kurangnya prasarana pengendalian banjir, amblesan permukaan tanah dan kenaikan muka air laut akibat *global warming* (Amri, dkk., 2016).

2.1.4.5 Kekeringan

Kekeringan adalah ketersediaan air yang jauh di bawah kebutuhan air untuk kebutuhan hidup, pertanian, kegiatan ekonomi dan lingkungan. Kekeringan dapat disebabkan oleh musim kemarau yang berkepanjangan yang mengakibatkan habisnya pasokan air tanah dan permukaan melalui proses penguapan, transpirasi, dan penggunaan berlebihan oleh manusia. Kekeringan berubah menjadi bencana alam ketika berbagai aktivitas yang membutuhkan sumberdaya air tidak lagi dapat dipenuhi, baik kegiatan pertanian maupun gangguan pada ekosistem tertentu. Beberapa penyebab kekeringan di Indonesia meliputi penyimpangan iklim, gangguan keseimbangan hidrologis, dan kekeringan agronomis (Rijanta, dkk., 2014).

Peta risiko bencana kekeringan Indonesia berada dalam kategori rendah hingga tinggi (Rijanta, dkk., 2014). Kekeringan sendiri merupakan salah satu jenis bencana alam yang terjadi secara perlahan (*slow on-set*), dengan durasi sampai dengan musim hujan tiba, serta berdampak sangat luas dan bersifat lintas sektor (ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan). Kekeringan merupakan salah satu permasalahan serius yang ada di Indonesia. Penyebabnya adalah menurunnya curah hujan pada periode yang lama, yang merupakan dampak dari interaksi

atmosfer dan laut, serta ketidakteraturan suhu permukaan laut yang terjadi di Indonesia dan sekitarnya, berupa fenomena El Nino, IOD (*Indian Ocean Dipole*) positif, dan siklus *monsoon* (Amri, dkk., 2016).

2.1.4.6 Angin Topan dan Gelombang Ekstrem

Angin topan adalah pusaran angin kencang dengan kecepatan angin 120 km/jam atau lebih yang sering terjadi di wilayah tropis diantara garis balik utara dan selatan, kecuali di daerah-daerah yang sangat berdekatan dengan khatulistiwa. Angin topan disebabkan oleh perbedaan tekanan dalam suatu sistem cuaca. Angin paling kencang yang terjadi di daerah tropis ini umumnya berpusar dengan radius ratusan kilometer di sekitar daerah sistem tekanan rendah yang ekstrem dengan kecepatan sekitar 20 km/jam. Di Indonesia dikenal dengan sebutan angin badai (Sigit, dkk., 2018).

Gelombang pasang ekstrim atau badai adalah gelombang tinggi yang ditimbulkan karena efek terjadinya siklon tropis di sekitar wilayah Indonesia dan berpotensi kuat menimbulkan bencana alam. Umumnya gelombang pasang terjadi karena adanya angin kencang/topan, perubahan cuaca yang sangat cepat, dan karena ada pengaruh dari gravitasi bulan maupun matahari. Kecepatan gelombang pasang sekitar 10-100 km/jam & gelombang pasang sangat berbahaya bagi kapal-kapal yang sedang berlayar pada suatu wilayah yang dapat menenggelamkan kapal-kapal tersebut (Amri, dkk., 2016).

Peta risiko bencana gelombang pasang Indonesia dalam kategori rendah hingga tinggi (Rijanta, dkk., 2014). Risiko bencana gelombang pasang umumnya hanya terjadi pada berbagai daerah yang berbatasan dengan laut lepas. Namun,

apabila dipicu oleh bahaya lainnya, bahaya gelombang pasang dapat menjadi bencana besar bagi masyarakat luas terutama mereka yang tinggal di daerah pesisir. Gelombang pasang yang diawali oleh gempa bumi di lautan dapat berpotensi menjadi tsunami yang dapat menghantam daerah pesisir. Selanjutnya, apabila dipicu oleh angin puting beliung, gelombang pasang berpotensi menjadi kekuatan besar yang dapat merusak daerah pesisir. Pada skala yang lebih ringan, gelombang pasang yang dipicu oleh angin lemah dapat menyebabkan banjir pasang (*coastal flood*) pada daerah pesisir (Rijanta, dkk., 2014).

2.1.4.7 Tanah Longsor

Longsor merupakan salah satu jenis gerakan massa tanah atau batuan, ataupun percampuran keduanya, menuruni atau keluar lereng akibat terganggunya kestabilan tanah atau batuan penyusun lereng. Penyebab utama dari longsor adalah gaya gravitasi yang memengaruhi lereng yang curam. Selain itu, terdapat pula beberapa faktor lain yang juga memengaruhi terjadinya longsor (Rijanta, dkk., 2014), meliputi:

1. Erosi yang disebabkan oleh aliran permukaan, sungai, dan gelombang laut yang menggerus kaki-kaki lereng.
2. Pelemahan lereng berbatu dan tanah oleh saturasi akibat hujan lebat.
3. Gempa bumi yang menyebabkan getaran hebat.
4. Letusan gunungapi yang menyebabkan getaran dan sedimentasi material berisiko longsor apabila terbawa air hujan.
5. Getaran dari mesin, lalu lintas, penggunaan bahan peledak, dan petir.

6. Beban karena massa yang berlebihan, baik diakibatkan oleh benda berat maupun tumpukan salju.

Risiko bencana longsor di Indonesia didominasi oleh kategori sedang hingga tinggi. Lokasi yang memiliki risiko tinggi adalah di daerah perbukitan hingga pegunungan. Secara khusus risiko bencana tanah longsor sedang hingga tinggi mengelompok pada wilayah yang berada di sepanjang bukit barisan (Rijanta, dkk., 2014). Bencana tanah longsor merupakan fenomena alam yang dikontrol oleh kondisi geologi, curah hujan dan pemanfaatan lahan pada lereng. Dalam beberapa tahun terakhir, intensitas terjadinya bencana gerakan tanah di Indonesia semakin meningkat, dengan sebaran wilayah bencana semakin luas. Hal ini disebabkan oleh makin meningkatnya pemanfaatan lahan yang tidak berwawasan lingkungan pada daerah rentan gerakan tanah, serta intensitas hujan yang tinggi dengan durasi yang panjang, ataupun akibat meningkatnya frekuensi kejadian gempa bumi (Amri, dkk., 2016).

Dalam periode 2010 hingga Februari 2018 telah terjadi bencana tanah longsor sebanyak 3.753 kali. Sebanyak 1.661 orang meninggal dunia akibat tanah longsor. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat pada awal tahun 2018 telah terjadi 438 kejadian bencana. Tanah longsor menjadi bencana yang paling mematikan. Total ada 60 orang meninggal dunia dan hilang akibat dari 438 kejadian bencana itu. Sebanyak 46 orang meninggal dunia dan hilang disebabkan oleh bencana tanah longsor (Hariyanto, 2018).

2.1.5 Pengurangan Resiko Bencana

Menurut *United Nations-International Strategy for Disaster Reduction* (UNISDR), pengurangan resiko bencana merupakan usaha sadar dan terencana dalam proses pembelajaran untuk memberdayakan peserta didik dalam upaya untuk pengurangan resiko bencana dan membangun budaya budaya aman serta tangguh terhadap bencana (Ariantoni, dkk., 2009). Pengurangan resiko bencana direalisasikan dengan mengembangkan motivasi, keterampilan, dan pengetahuan agar dapat bertindak dan mengambil bagian dari upaya untuk pengurangan resiko bencana. Pengurangan resiko bencana yang berkaitan dengan pendidikan, perlu menjadi program prioritas dalam sektor pendidikan yang diwujudkan dalam pendidikan pengurangan resiko di sekolah/madrasah.

Tujuan pendidikan untuk pengurangan resiko bencana antara lain mencakup (Kementrian Pendidikan Nasional, 2010) :

1. Menumbuhkembangkan nilai dan sikap kemanusiaan,
2. Menumbuhkembangkan sikap dan kepedulian terhadap resiko bencana,
3. Mengembangkan pemahaman tentang resiko bencana, pemahaman tentang kerentanan sosial, pemahaman tentang kerentanan fisik, serta kerentanan perilaku dan motivasi,
4. Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan untuk pencegahan dan pengurangan resiko bencana, pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan yang bertanggungjawab dan adaptasi terhadap resiko bencana,
5. Mengembangkan upaya untuk pengurangan resiko bencana diatas, baik secara individu maupun kolektif,

6. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan siaga bencana,
7. Meningkatkan kemampuan tangga darurat bencana,dan
8. Mengembangkan kesiapan untuk mendukung pembangunan kembali komunitas saat bencana terjadi dan mengurangi dampak yang disebabkan karena terjadinya bencana, serta
9. Meningkatkan kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan besar dan mendadak.

Dalam upaya mendorong sekolah untuk membangun kesiapsiagaan bencana, berbagai institusi telah melakukan berbagai kegiatan/program pendidikan pengurangan risiko bencana di tingkat sekolah dengan metodologi yang dikembangkan masing-masing.Konsorsium Pendidikan Bencana (KPB) mencatat berbagai program dan terminologi yang dipakai seperti Sekolah Siaga Bencana (SSB), Pengurangan Risiko Bencana Berbasiskan Sekolah (PRBBS), atau Sekolah Ramah Anak. Pengupayaan kesiapsiagaan bencana di sekolah menjadi agenda penting bersama yang merupakan upaya dan tanggungjawab dari warga sekolah dan para pemangku kepentingan sekolah (Konsorsium Pendidikan Bencana Indonesia, 2011).

2.1.6 Sistem Manajemen Bencana

Manajemen bencana menurut Nurjanah (2012) adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari bencana beserta segala aspek yang berkaitan dengan bencana, terutama risiko bencana dan bagaimana menghindari risiko bencana.Manajemen bencana merupakan proses dinamis tentang bekerjanya fungsi-fungsi manajemen yang kita kenal selama ini misalnya fungsi planning, organizing, actuating, dan

controlling. Cara bekerja manajemen bencana adalah melalui kegiatan-kegiatan yang ada pada tiap kuadran atau siklus atau bidang kerja yaitu pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan, tanggap darurat, serta pemulihan. Sedangkan tujuannya secara umum antara lain untuk melindungi masyarakat beserta harta bendanya dari ancaman bencana.

2.1.6.1 Pra Bencana

Tahapan manajemen bencana pada kondisi sebelum kejadian atau pra bencana meliputi kesiagaan, peringatan dini dan mitigasi (Ramli, 2010).

2.1.6.1.1 Kesiapsiagaan

Kesiapsiagaan adalah perkiraan tentang kebutuhan yang akan timbul jika terjadi bencana dan memastikan sumberdaya untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Kesiapsiagaan akan membawa manusia di daerah rawan bencana pada tataran kesiapan/kesiapsiagaan yang lebih baik dalam menghadapi bencana. Kegiatan kesiapsiagaan meletakkan aturan-aturan penanggulangan kedaruratan sedemikian rupa sehingga menjadi lebih efektif, termasuk kegiatan penyusunan dan uji coba rencana kontinjensi, mengorganisasi, memasang, dan menguji sistem peringatan dini, logistik kebutuhan dasar, pelatihan, dan prosedur tetap lainnya (Nurjanah, dkk., 2012). UNISDR dalam Konsorsium Pendidikan Bencana Indonesia menyatakan bahwa kesiapsiagaan adalah pengetahuan dan kepastian yang dikembangkan oleh pemerintah, organisasi profesional penyelenggara tanggap darurat dan pemulihan pasca bencana, masyarakat dan individu untuk secara efektif mengantisipasi, merespon dan pulih dari dampak peristiwa bahaya yang dapat terjadi dan yang akan terjadi.

Kesiapsiagaan bertujuan untuk meminimalkan efek samping bahaya melalui tindakan pencegahan yang efektif, tepat waktu, memadai, efisiensi untuk tindakan tanggap darurat dan bantuan pada saat bencana (Gregg et al., 2004; Perry and Lindell, 2008). Contoh kegiatan kesiapsiagaan diantaranya: mempersiapkan rencana saat bahaya terjadi, meningkatkan kemampuan mengenai bahaya dengan mengikuti pelatihan, memahami rute evakuasi, pembagian kerja saat bahaya terjadi, penyediaan stok alat-alat darurat, meminta pertolongan pertama (Perry and Lindell, 2008; Sutton and Tierney, 2006).

Salah satu prioritas program pengurangan risiko bencana dari Kerangka Aksi Hyogo adalah memperkuat kesiapsiagaan terhadap bencana demi respon yang efektif di semua tingkat, dengan indikator pencapaian (Peraturan Kepala BNPB No. 03 Tahun 2012), berupa:

1. Tersedianya kebijakan, kapasitas teknis kelembagaan serta mekanisme penanganan darurat bencana yang kuat dengan perspektif pengurangan risiko bencana dalam pelaksanaannya.
2. Tersedianya rencana kontinjensi bencana yang berpotensi terjadi yang siap di semua jenjang pemerintahan, latihan reguler diadakan untuk menguji dan mengembangkan program-program tanggap darurat bencana.
3. Tersedianya cadangan finansial dan logistik serta mekanisme antisipasi yang siap untuk mendukung upaya penanganan darurat yang efektif dan pemulihan pasca bencana.
4. Tersedianya prosedur yang relevan untuk melakukan tinjauan pasca bencana terhadap pertukaran informasi yang relevan selama masa tanggap darurat.

2.1.6.1.2 Peringatan Dini

Peringatan dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang (BNPB, 2009). Peringatan dini diperlukan untuk memberikan peringatan kepada masyarakat tentang bencana yang akan terjadi sebelum kejadian seperti banjir, gempa bumi, tsunami, letusan gunung berapi atau badai. Peringatan dini harus segera disampaikan kepada semua pihak, khususnya mereka yang yang potensi terkena bencana akan kemungkinan datangnya suatu bencana di daerah masing-masing. Peringatan didasarkan berbagai informasi teknis dan ilmiah yang dimiliki, diolah atau diterima dari pihak berwenang mengenai kemungkinan akan datangnya suatu bencana. Sebagai contoh, jauh sebelum badai Katrina tiba, badan yang berwenang sudah dapat melakukan ramalan dan memperkirakan kapan terjadinya badai, lokasi, serta kekuatannya. Dengan demikian anggota masyarakat dapat diberi informasi sehingga mereka dapat mempersiapkan dirinya dengan baik (Ramli, 2010).

2.1.6.1.3 Mitigasi

Menurut Peraturan Pemerintah (PP) No. 21 tahun 2008, mitigasi bencana adalah serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Mitigasi bencana adalah upaya untuk mencegah atau mengurangi dampak yang ditimbulkan akibat suatu bencana.

Mitigasi bencana harus dilakukan secara terencana dan komprehensif melalui berbagai upaya dan pendekatan antara lain:

1. Pendekatan Teknis:

Secara teknis mitigasi bencana dilakukan untuk mengurangi dampak suatu bencana, misalnya:

- 1) Membuat rancangan atau desain yang kokoh dari bangunan sehingga tahan terhadap gempa.
- 2) Membuat material yang tahan terhadap bencana, misalnya material tahan api.
- 3) Membuat rancangan teknis pengamanan, misalnya tanggul banjir, tanggul lumpur, tanggul tangki untuk mengendalikan tumpahan bahan berbahaya.

2. Pendekatan Manusia

Pendekatan secara manusia ditujukan untuk membentuk manusia yang paham dan sadar mengenai bahaya bencana. Untuk itu perilaku dan cara hidup manusia harus dapat diperbaiki dan disesuaikan dengan kondisi lingkungan dan potensi bencana yang dihadapinya.

3. Pendekatan Administratif

Pemerintah atau pimpinan organisasi dapat melakukan pendekatan administratif dalam manajemen bencana, khususnya di tahap mitigasi sebagai contoh:

- 1) Penyusunan tata ruang dan tata lahan yang memperhitungkan aspek risiko bencana.
- 2) System perijinan dengan memasukkan aspek analisa risiko bencana.
- 3) Penerapan kajian bencana untuk setiap kegiatan dan pembangunan industri beresiko tinggi.

- 4) Mengembangkan program pembinaan dan pelatihan bencana di seluruh tingkat masyarakat dan lembaga pendidikan.
- 5) Menyiapkan prosedur tanggap darurat dan organisasi tanggap darurat di setiap organisasi pemerintahan maupun industri beresiko tinggi.

4. Pendekatan Kultural

Masih ada anggapan dikalangan masyarakat bahwa bencana adalah takdir sehingga harus diterima apa adanya. Hal ini tidak sepenuhnya benar, karena dengan kemampuan berpikir dan berbuat, manusia dapat berupaya menjauhkan diri dari bencana dan sekaligus mengurangi keparahannya.

Oleh karena itu, diperlukan pendekatan kultural untuk meningkatkan kesadaran mengenai bencana. Melalui pendekatan kultural, pencegahan bencana disesuaikan dengan kearifan masyarakat lokal yang telah membudaya sejak lama.

Upaya pengendalian dan pencegahan bencana disesuaikan dengan budaya lokal dan tradisi yang berkembang ditengah masyarakat. Sebagai contoh, bagaimana keberhasilan Wali Songo mengembangkan agama Islam melalui pendekatan budaya melalui wayang atau tradisi lainnya. Sebaiknya pemerintah daerah setempat mengembangkan budaya dan tradisi local tersebut untuk membangun kesadaran akan bencana di tengah masyarakat.

2.1.6.2 Saat Bencana

Tahapan paling krusial dalam system manajemen bencana adalah saat bencana sesungguhnya terjadi. Mungkin telah melalui proses peringatan dini, maupun tanpa peringatan atau terjadi secara tiba-tiba. bencana banjir mungkin dapat diperkirakan sebelumnya berdasarkan angka curah hujan yang terjadi.

Bencana angin topan juga dapat diprediksi sebelumnya sehingga saat kejadian masyarakat sudah mempersiapkan dirinya masing-masing. Namun banyak bencana khususnya gempa bumi yang masih sulit diperkirakan terjadinya. Oleh karena itu diperlukan langkah-langkah seperti tanggap darurat untuk dapat mengatasi dampak bencana dengan cepat dan tepat agar jumlah korban atau kerugian dapat diminimalkan (Ramli, 2010).

2.1.6.2.1 Tanggap Darurat

Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan serta pemulihan prasarana dan sarana. Tindakan ini dilakukan oleh Tim penanggulangan bencana yang dibentuk di masing-masing daerah atau organisasi (Anies, 2018).

Menurut PP No. 11, langkah-langkah yang dilakukan dalam kondisi tanggap darurat antara lain:

1. Pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, dan sumberdaya, sehingga dapat diketahui dan diperkirakan magnitude bencana, luas area yang terkena dan perkiraan tingkat kerusakannya.
2. Penentuan status keadaan darurat bencana.
3. Berdasarkan penelitian awal dapat diperkirakan tingkat bencana sehingga dapat pula ditentukan status keadaan darurat. Jika tingkat bencana terlalu

besar dan berdampak luas, mungkin bencana tersebut dapat digolongkan sebagai bencana nasional.

4. Penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana.

Langkah berikutnya adalah melakukan penyelamatan dan evakuasi korban bencana. Kemungkinan besar bencana tersebut menimbulkan korban yang dapat segera ditemukan, namun tidak jarang pula korban terjebak atau tertimbun reruntuhan sehingga diperlukan upaya keras untuk dapat menyelamatkannya. Hal yang dapat dilakukan antara lain:

1) Pemenuhan kebutuhan dasar

Dalam kondisi bencana, kemungkinan besar semua sarana umum, sanitasi, dan logistik mengalami kehancuran atau sekurangnya terputus. Untuk itu, salah satu langkah yang harus dilakukan adalah memberikan layanan kebutuhan dasar seperti pangan dan papan.

2) Perlindungan terhadap kelompok rentan

Salah satu prioritas dalam penyelamatan korban bencana adalah kelompok yang dikategorikan rentan, misalnya anak-anak, orangtua, cacat, pasien di rumah sakit, dan kaum lemah lainnya. Mereka perlu dibantu terlebih dahulu dan dievakuasi ke tempat yang lebih aman sehingga tidak menambah jumlah korban bencana.

3) Pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital

Tim tanggap darurat juga bertugas untuk segera memulihkan kondisi prasarana yang mengalami kerusakan akibat bencana seperti saluran air minum, listrik, dan telepon.

Sarana vital ini sangat menentukan dalam mendukung upaya pemulihan dan penyelamatan korban bencana.

2.1.6.2.2 Penanggulangan Bencana

Selama kegiatan tanggap darurat, upaya yang dilakukan adalah menanggulangi bencana yang terjadi sesuai dengan sifat dan jenisnya. Penanggulangan bencana memerlukan keahlian dan pendekatan khusus menurut kondisi dan skala kejadian. Sebagai contoh kasus lumpur Lapindo memerlukan upaya penanggulangan yang tidak mudah untuk dapat menghentikan semburan lumpur. Kebakaran atau tumpahan minyak dalam jumlah besar di laut lepas juga memerlukan upaya penanggulangan yang sangat berat dengan mengerahkan seluruh tim tanggap darurat, bahkan mungkin memerlukan sumberdaya tambahan. Tim tanggap darurat diharapkan mampu menangani segala bentuk bencana. Oleh karena itu tim tanggap darurat harus diorganisir dan dirancang untuk dapat menangani berbagai jenis bencana (Ramli, 2010).

2.1.6.3 Pasca Bencana

Setelah bencana terjadi dan setelah proses tanggap darurat dilewati, maka langkah berikutnya adalah melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi (Ramli, 2010).

2.1.6.3.1 Rehabilitasi

Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan public atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana (Anies, 2018).

Di tingkat industri atau perusahaan, fase rehabilitasi dilakukan untuk mengembalikan jalannya operasi perusahaan seperti sebelum bencana terjadi. Upaya rehabilitasi misalnya memperbaiki peralatan yang rusak dan memulihkan jalannya perusahaan seperti semula (Ramli, 2010).

2.1.6.3.2 Rekonstruksi

Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, social, dan budaya, tegaknya hukum, dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pasca bencana (Anies, 2018).

Proses rekonstruksi tidak mudah dan memerlukan upaya keras dan terencana dan peran serta semua anggota masyarakat. Sebagai contoh, rekonstruksi Aceh pasca tsunami memerlukan waktu kurang dari 5 tahun agar kondisi fisik dan mental, lingkungan dan teknis, serta prasarana ekonomi dibangun kembali dan diharapkan akan lebih baik dibanding kondisi sebelum bencana (Ramli, 2010).

2.1.7 Sekolah Siaga Bencana

Kamus Besar Bahasa Indonesia, mendefinisikan kesiapsiagaan sebagai keadaan siap siaga. Berasal dari kata dasar siap siaga, yang berarti siap untuk digunakan atau untuk bertindak. Dalam Bahasa Inggris, padanan kata kesiapsiagaan adalah *preparedness*. Sementara definisi yang diberikan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, adalah

serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna (Republik Indonesia, 2007).

Sekolah Siaga Bencana adalah sekolah yang memiliki kemampuan untuk mengelola risiko bencana di lingkungannya. Kemampuan tersebut diukur dengan dimilikinya perencanaan penanggulangan bencana (sebelum, saat dan sesudah bencana), ketersediaan logistik, keamanan dan kenyamanan di lingkungan pendidikan, infrastruktur, serta sistem kedaruratan, yang didukung oleh adanya pengetahuan dan kemampuan kesiapsiagaan, prosedur tetap (*standard operational procedure*), dan sistem peringatan dini. Kemampuan tersebut juga dapat dinalar melalui adanya simulasi regular dengan kerja bersama berbagai pihak terkait yang dilembagakan dalam kebijakan lembaga pendidikan tersebut untuk mentransformasikan pengetahuan dan praktik penanggulangan bencana dan pengurangan risiko bencana kepada seluruh warga sekolah sebagai konstituen lembaga pendidikan (Konsorsium Pendidikan Bencana Indonesia, 2011).

Pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan Nasional, menyadari penting pengarusutamaan risiko bencana di sekolah. Dalam konteks pendidikan pengurangan risiko bencana, konsep dasar ini merupakan perwujudan dari Kerangka Kerja Hyogo 2005-2015, Prioritas 3 (tiga), yaitu menggunakan pengetahuan, inovasi dan pendidikan untuk membangun sebuah budaya keselamatan dan ketahanan di semua tingkat. Maka, disusun konsep Sekolah Siaga Bencana yang tidak hanya terpaku pada unsure kesiapsiagaan saja, melainkan juga meliputi upaya-upaya mengembangkan pengetahuan secara

inovatif untuk mencapai budaya keselamatan, keamanan, dan ketahanan bagi seluruh warga sekolah terhadap bencana (Taufik, 2016).

Di dalam buku Konsorsium Pendidikan Bencana Indonesia Pendidikan Bencana Indonesia (2011), untuk mengukur upaya yang dilakukan sekolah dalam membangun Sekolah Siaga Bencana (SSB), perlu ditetapkan parameter, indikator, dan verifikasinya. Parameter adalah standar minimum yang bersifat kualitatif dan menentukan tingkat minimum yang harus dicapai dalam pemberian respon pendidikan. Indikator merupakan “penanda” yang menunjukkan apakah standar telah dicapai. Indikator memberikan cara mengukur dan mengkomunikasikan dampak, atau hasil dari suatu program, sekaligus juga proses, atau metode yang digunakan. Indikator bisa bersifat kualitatif atau kuantitatif. Sedangkan verifikasi adalah bukti yang telah ditetapkan untuk menunjukkan indikator. Parameter kesiapsiagaan sekolah diidentifikasi terdiri dari empat faktor, meliputi:

1. Sikap dan Tindakan.
2. Kebijakan sekolah.
3. Perencanaan Kesiapsiagaan.
4. Mobilisasi Sumberdaya.

2.1.7.1 Sikap dan Tindakan

Dasar dari setiap sikap dan tindakan manusia adalah adanya persepsi, pengetahuan dan keterampilan yang dimilikinya. SSB ingin membangun kemampuan seluruh warga sekolah, baik individu maupun warga sekolah secara kolektif, untuk menghadapi bencana secara cepat dan tepat guna. Dengan demikian, seluruh warga sekolah menjadi target sasaran, tidak hanya murid (Konsorsium Pendidikan Bencana Indonesia, 2011).

Sikap dan tindakan ini dapat memberikan kontribusi untuk manajemen pra bencana yaitu seluruh warga sekolah memperoleh pengetahuan mengenai upaya yang bisa dilakukan untuk mengurangi risiko bencana di sekolah.

2.1.7.2 Kebijakan Sekolah

Kebijakan sekolah adalah keputusan yang dibuat secara formal oleh sekolah mengenai hal-hal yang perlu didukung dalam pelaksanaan PRB (Pengurangan Risiko Bencana) di sekolah, baik secara khusus maupun terpadu. Keputusan tersebut bersifat mengikat. Pada praktiknya, kebijakan sekolah akan landasan, panduan, arahan pelaksanaan kegiatan terkait dengan PRB di sekolah (Konsorsium Pendidikan Bencana Indonesia, 2011).

Indikator dari kebijakan sekolah, yaitu:

1. Adanya kebijakan, kesepakatan dan/atau peraturan sekolah yang mendukung upaya pengurangan risiko bencana di sekolah, dapat diverifikasi melalui dokumen I KTSP dan dokumen kebijakan sekolah tentang persyaratan konstruksi bangunan dan panduan retrofit yang ada atau yang berlaku;
2. Tersedianya akses bagi seluruh komponen sekolah terhadap informasi, pengetahuan dan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas dalam hal PRB. Diverifikasi melalui jumlah kesempatan, keikutsertaan warga sekolah dalam pelatihan, musyawarah guru, pertemuan desa, jambore murid, dll.

Kebijakan tentang kesiapsiagaan sekolah dalam mengantisipasi bencana sangat penting dan memegang peran utama dalam peningkatan kesiapsiagaan komunitas sekolah. Kebijakan, parameter kedua dari *framework* kesiapsiagaan mengantisipasi bencana, merupakan acuan atau panduan untuk melakukan berbagai kegiatan dan upaya yang sangat diperlukan komunitas sekolah agar dapat

mengurangi risiko apabila terjadi bencana alam. Kebijakan sekolah adalah landasan bagi komunitas sekolah untuk mengembangkan kesiapsiagaan, baik melalui proses belajar mengajar mata pelajaran wajib yang relevan dan mata pelajaran muatan lokal (mulok), maupun melalui pengembangan diri dalam kegiatan ekstra kurikuler. Tingkat kesiapsiagaan kebijakan sekolah untuk mengantisipasi bencana alam didasarkan pada indikator keberadaan kebijakan atau program pendidikan kesiapsiagaan sekolah di tingkat Kota/Kabupaten dan di tingkat sekolah. Kebijakan sekolah pada dasarnya dapat dikelompokkan dalam dua bagian, yaitu (LIPI, 2010) :

1. Peningkatan pengetahuan dan keterampilan komunitas sekolah (guru dan siswa) untuk mengantisipasi bencana, termasuk:
 - 1) Pengintegrasian materi kesiapsiagaan dalam pelajaran (wajib dan muatan lokal yang relevan) dan kegiatan ekstrakurikuler;
 - 2) Pelaksanaan simulasi evakuasi secara reguler.
2. Peningkatan kapasitas sekolah yang terdiri dari:
 - 1) Pembentukan organisasi pengelola kesiapsiagaan, seperti gugus siaga bencana;
 - 2) Pengelolaan pemenuhan kebutuhan dasar komunitas sekolah, termasuk *back-up* atau duplikasi dokumen-dokumen penting;
 - 3) Sarana dan prasarana kesiapsiagaan sekolah, seperti peralatan untuk peringatan dini bencana, rencana untuk merespons kondisi darurat, pertolongan pertama dan evakuasi;
 - 4) Peningkatan kualitas/ketahanan bangunan fisik sekolah;

5) Pengalokasian dana untuk kegiatan kesiapsiagaan sekolah.

Keberadaan kebijakan sekolah diukur dari beberapa poin, seperti Surat Keputusan (SK) atau surat edaran atau keputusan rapat dewan guru yang berkaitan dengan kebijakan yang sudah dikemukakan di atas.

2.1.7.2.1 Visi dan Misi

Menurut Kurniadin dan Machali (2013) bahwa dalam sebuah perencanaan meliputi beberapa hal antara lain, penetapan tujuan-tujuan dan maksud organisasi, perkiraan lingkungan (sumber dari hambatan) dalam hal apa tujuan-tujuan dan maksud itu harus dicapai dan penentuan pendekatan yang akan mencapai tujuan-tujuan dan maksud itu. Penetapan tujuan program SSB termuat dalam Kebijakan Penanggulangan Bencana yang ada dalam Rencana Aksi Sekolah (RAS). Didalam Kebijakan Penanggulangan Bencana terdapat Visi dan Misi, dalam merumuskan visi penanggulangan bencana sekolah diintegrasikan dengan visi dan misi sekolah.

2.1.7.2.2 Peraturan/Kesepakatan

Kebijakan yang dibuat untuk mendukung kesiapsiagaan sekolah sebaiknya dituangkan secara tertulis. Karena suatu kebijakan harus dapat diketahui oleh seluruh warga sekolah sebagai subjek yang diatur dalam kebijakan tersebut. Selain itu juga merupakan bukti fisik yang dapat menjadi satu indikator suatu sekolah dikatakan siap mengantisipasi bencana. Ada beberapa contoh kebijakan yang dapat dibuat atau dikembangkan oleh sekolah dalam upaya membangun sekolah siaga bencana, seperti (LIPI, 2013):

1. Surat atau dokumen yang menyatakan pengintegrasian materi kesiapsiagaan mengantisipasi bencana ke dalam pelajaran wajib yang relevan, pelajaran muatan lokal dan kegiatan ekstra kurikuler.
2. Surat Keputusan (SK) pembentukan Gugus Siaga Bencana di sekolah. Dalam SK ini tertulis komponen sekolah apa saja yang masuk ke dalam beberapa kelompok gugus siaga bencana. SK ini juga menjelaskan tugas pokok dan fungsi dari tiap kelompok gugus siaga bencana ketika sebelum terjadi bencana, saat terjadi bencana dan setelah terjadi bencana.
3. Surat atau dokumen yang menyatakan adanya alokasi anggaran/dana untuk kegiatan kesiapsiagaan bencana di sekolah. Untuk kebijakan ini sekolah sebaiknya melibatkan komite sekolah dan Dinas Pendidikan daerah yang berperan sebagai pengawas dalam pengelolaan sekolah.
4. Surat atau dokumen yang menyatakan adanya latihan atau simulasi evakuasi bencana yang dilakukan sekolah secara regular.

2.1.7.2.3 Penganggaran

Kebijakan merupakan landasan yang sangat diperlukan sekolah untuk mendukung peningkatan kesiapsiagaan mengantisipasi bencana. Kebijakan diperlukan oleh seluruh komponen sekolah dalam bertindak dan menjadi panduan untuk pelaksanaan kesiapsiagaan di sekolah. Kebijakan yang diperlukan dalam upaya kesiapsiagaan bencana bagi sekolah salah satunya adalah adanya anggaran yang dikhususkan untuk kesiapsiagaan bencana (LIPI, 2010).

Pendanaan dan pengelolaan bantuan bencana ditujukan untuk mendukung upaya penanggulangan bencana secara berdayaguna, berhasilguna, dan dapat

dipertanggungjawabkan. Dana penanggulangan bencana berasal dari APBN, APBD, dan/atau masyarakat. Dalam anggaran penanggulangan bencana yang bersumber dari APBN, Pemerintah menyediakan dana kontijensi bencana yaitu dana yang disediakan dalam APBN untuk kegiatan kesiapsiagaan pada tahap prabencana (PP No.22 tahun 2008)

2.1.7.2.4 Program Kegiatan/Perencanaan

Program adalah rangkaian kegiatan-kegiatan atau seperangkat tindakan untuk mencapai tujuan. Meningkatkan kesiapsiagaan dalam rencana tanggap darurat sekolah dapat diindikasikan dalam beberapa kegiatan yang dapat dilakukan di sekolah, seperti (LIPI, 2013):

1. Membuat salinan/duplikat dokumen-dokumen penting sekolah yang disimpan di tempat yang aman.
2. Membuat rencana evakuasi yang diwujudkan dalam penentuan tempat evakuasi; denah dan jalur evakuasi; rambu petunjuk arah evakuasi; peralatan evakuasi.
3. Membuat prosedur tetap (protap) evakuasi.
4. Membentuk posko/unit kesehatan sekolah atau PMR sebagai wadah kaderisasi sumber daya manusia sekolah dalam pertolongan pertama.
5. Mengadakan pelatihan pertolongan pertama dengan di damping oleh instansi terkait seperti PMI, Puskesmas dan Dinas Kesehatan daerah.
6. Melakukan latihan/simulasi evakuasi secara rutin.

2.1.7.2.5 Monitoring dan Evaluasi

Pemantauan (monitoring) adalah proses pengumpulan dan analisis informasi (berdasarkan indikator yang telah ditetapkan) secara sistematis dan kontinu tentang kegiatan program sehingga dapat dilakukan tindakan koreksi untuk penyempurnaan program selanjutnya. Monitoring Sekolah Siaga Bencana (SSB) dilakukan dengan tujuan (LIPI, 2011):

1. Mengkaji apakah kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan rencana;
2. Mengidentifikasi masalah yang timbul sehingga dapat segera diatasi;
3. Melakukan penilaian apakah pola kerja dan pengembangan sekolah siaga bencana yang digunakan sudah sesuai/tepat untuk mencapai tujuan program;
4. Mengetahui kaitan antara kegiatan dengan tujuan untuk memperoleh ukuran kemajuan;
5. Menyesuaikan kegiatan dengan lingkungan yang berubah tanpa menyimpang dari tujuan.

Evaluasi adalah proses penilaian pencapaian tujuan dan pengungkapan masalah kinerja program untuk memberikan umpan balik bagi peningkatan kualitas kinerja program. Evaluasi Sekolah Siaga Bencana (SSB) dilakukan untuk mendapatkan informasi dan menarik pelajaran dari pengalaman mengenai pengembangan sekolah siaga bencana, keluaran, manfaat, dan dampak dari sekolah siaga bencana yang baru selesai dilaksanakan, maupun yang sudah berfungsi, sebagai umpan balik bagi pengambilan keputusan dalam rangka

perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pengendalian program selanjutnya (LIPI, 2011).

Monitoring dan evaluasi siaga bencana dapat dilakukan oleh pihak internal maupun eksternal sekolah. Internal sekolah dapat dilakukan oleh Kepala Sekolah atau Wakil maupun guru yang diberi mandat untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi ini. Adapun pihak eksternal yang dapat melakukan monitoring dan evaluasi sekolah siaga bencana ini antara lain pengawas sekolah atau dari dinas pendidikan daerah setempat, penyandang dana dari program pembentukan sekolah siaga bencana itu sendiri, bahkan perguruan tinggi setempat (LIPI, 2011).

2.1.7.3 Perencanaan Kesiapsiagaan

Perencanaan kesiapsiagaan bertujuan untuk menjamin adanya tindakan cepat dan tepat guna pada saat terjadi bencana dengan memadukan dan mempertimbangkan sistem penanggulangan bencana di daerah dan disesuaikan kondisi wilayah setempat. Bentuk atau produk dari perencanaan ini adalah dokumen-dokumen, seperti protap kesiapsiagaan, rencana kedaruratan/kontijensi, dan dokumen pendukung kesiapsiagaan terkait, termasuk sistem peringatan dini yang disusun dengan mempertimbangkan akurasi dan kontekstualitas lokal (Konsorsium Pendidikan Bencana Indonesia, 2011).

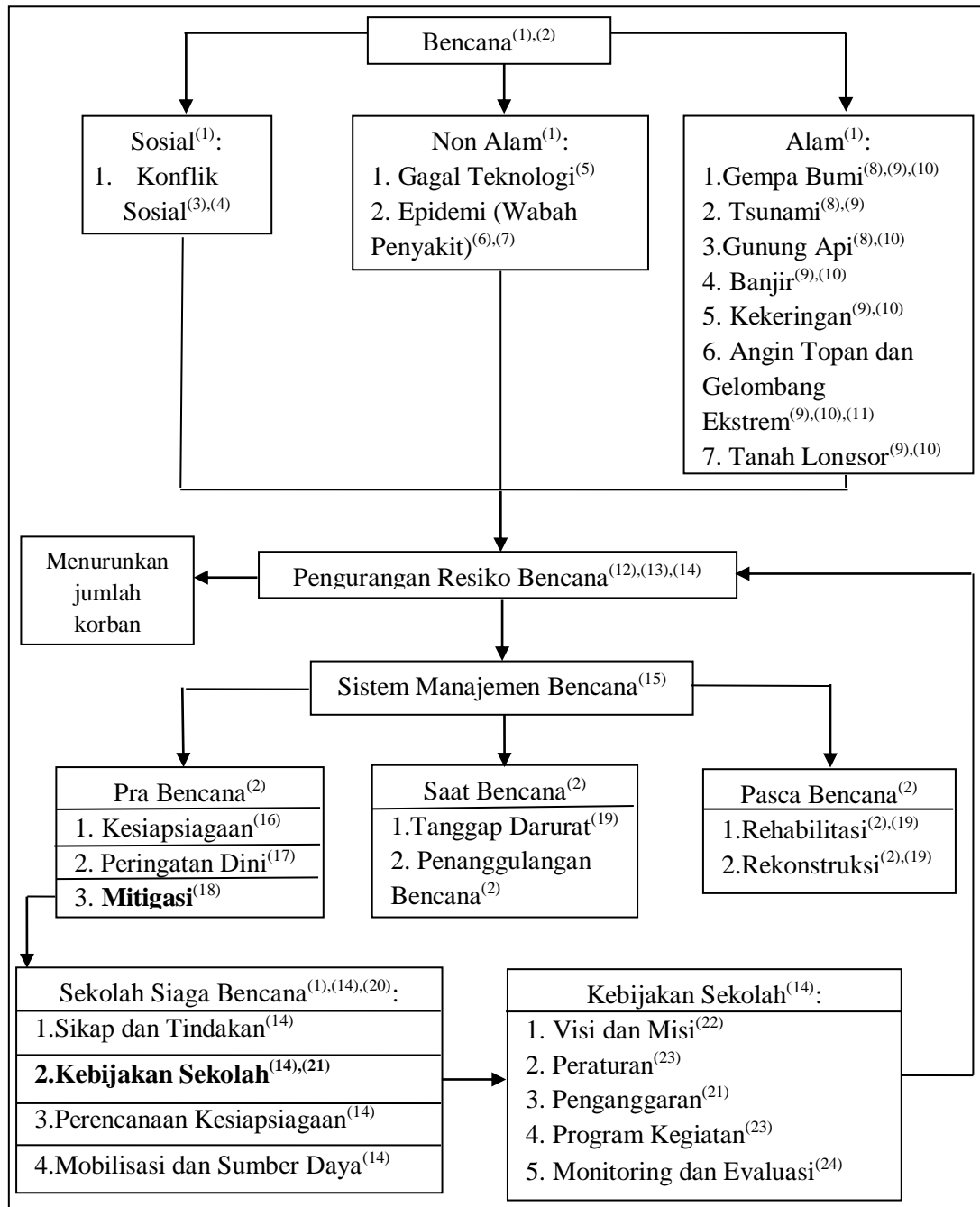
2.1.7.4 Mobilisasi dan Sumber Daya

Sekolah harus menyiapkan sumber daya manusia, sarana, dan prasarana, serta finansial dalam pengelolaan untuk menjamin kesiapsiagaan bencana sekolah. Mobilisasi sumber daya didasarkan pada kemampuan sekolah dan pemangku sekolah. Mobilisasi ini juga terbuka bagi peluang partisipasi dari para

pemangku kepentingan lainnya (Konsorsium Pendidikan Bencana Indonesia, 2011).

Keempat parameter di atas adalah perangkat pengukuran kesiapsiagaan bencana di sekolah. Dalam pengukuran, masing-masing parameter itu tidak berdiri sendiri, melainkan saling terkait satu sama lainnya. Dari ukuran yang didapat dari sekolah terkait, dapat diketahui mengenai tingkat ketahanan sekolah terhadap ancaman bencana tertentu. Dalam praktiknya, kesiapsiagaan sekolah juga dipadukan dengan upaya kesiapsiagaan aparat pemerintah dan masyarakat di daerah atau lingkungan terdekat sekolah (Konsorsium Pendidikan Bencana Indonesia, 2011).

2.2 KERANGKA TEORI



Gambar 2.7 Kerangka Teori

Sumber: Republik Indonesia, 2007⁽¹⁾; Ramli, 2010⁽²⁾; BNPB, 2017⁽³⁾; RAN PRB 2006-2009⁽⁴⁾; RAN PRB 2015-2019⁽⁵⁾; UU No. 4 tahun 1984⁽⁶⁾; Hasmi, 2011⁽⁷⁾; Hartuti, 2009⁽⁸⁾; Amri *et al*, 2016⁽⁹⁾; Rijanta *et al*, 2014⁽¹⁰⁾; Sigit *et al*, 2018⁽¹¹⁾; Ariantoni *et al.*, 2009⁽¹²⁾; Kementerian Pendidikan Nasional, 2010⁽¹³⁾; KPBI, 2011⁽¹⁴⁾; Nurjanah, 2012⁽¹⁵⁾; BNPB, 2012⁽¹⁶⁾; BNPB,

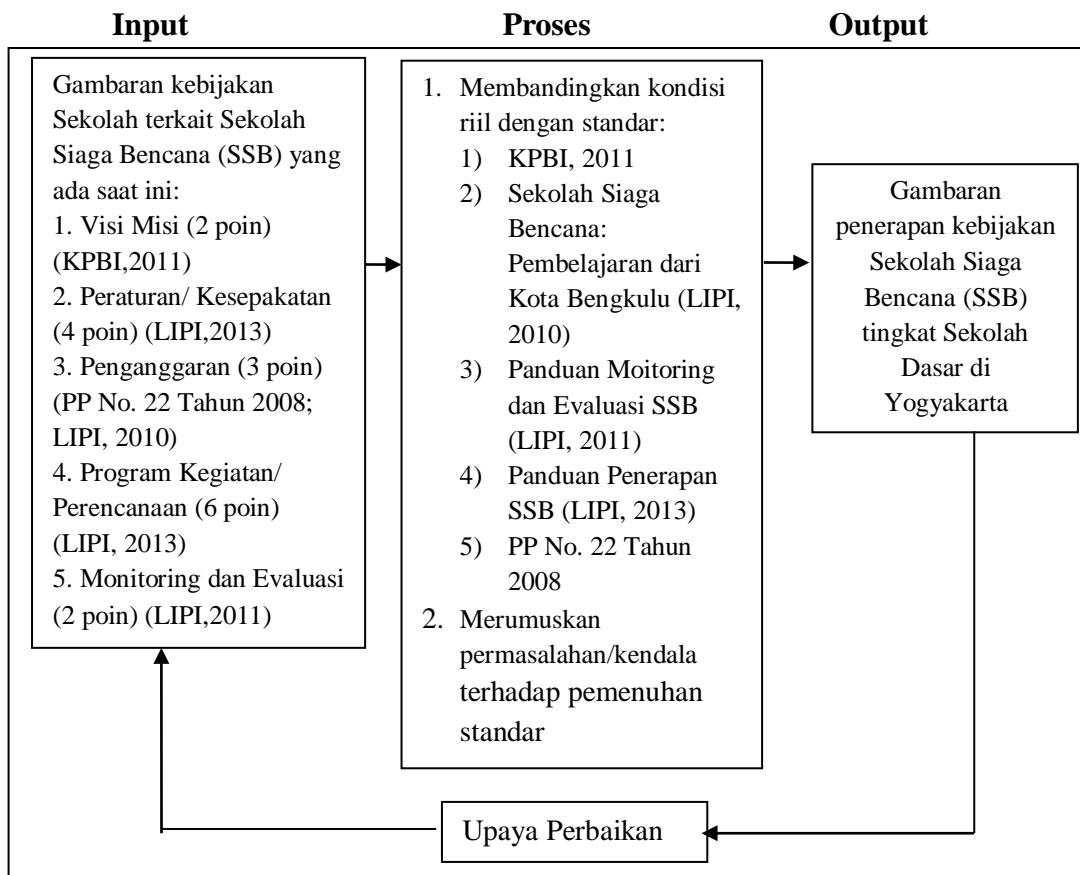
2009⁽¹⁷⁾; PP No.21 tahun 2008⁽¹⁸⁾; Anies, 2018⁽¹⁹⁾; Taufik, 2016⁽²⁰⁾; LIPI, 2010⁽²¹⁾; Kurniadin & Machali, 2013⁽²²⁾; LIPI, 2013⁽²³⁾; dan LIPI, 2011⁽²⁴⁾.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 ALUR PIKIR

Alur pikir dalam penelitian ini yang berjudul gambaran penerapan kebijakan Sekolah Siaga Bencana tingkat Sekolah Dasar di Yogyakarta.



Gambar 3.1 Alur Pikir

3.2 FOKUS PENELITIAN

Fokus yang sebenarnya dalam penelitian kualitatif diperoleh setelah melakukan *grand tour observation* dan *grand tour question* atau yang disebut dengan penjelajahan umum. Dari penjelajahan umum ini peneliti akan memperoleh gambaran umum menyeluruh yang masih pada tahap permukaan

tentang situasi sosial. Untuk dapat memahami secara lebih luas dan mendalam, maka diperlukan pemilihan fokus penelitian (Sugiyono, 2016). Fokus dalam penelitian ini adalah mengetahui gambaran penerapan kebijakan Sekolah Siaga Bencana tingkat Sekolah Dasar di Yogyakarta berdasarkan parameter kebijakan sekolah siaga bencana. Terdapat lima indikator dalam parameter kebijakan sekolah siaga bencana yaitu visi misi, peraturan/kesepakatan, penganggaran, program kegiatan, dan monitoring evaluasi. Pada indikator visi misi terdapat 1 poin yaitu adanya dokumen I KTSP (termasuk didalamnya visi, misi, dan tujuan sekolah) yang memuat dan/atau mendukung upaya pengurangan resiko bencana di sekolah. Lalu pada indikator peraturan/kesepakatan terdapat 4 poin yaitu pertama adanya surat atau dokumen yang menyatakan pengintegrasian materi kesiapsiagaan mengantisipasi bencana kedalam pelajaran wajib yang relevan, pelajaran muatan lokal dan kegiatan ekstrakurikuler, kedua adanya surat keputusan (SK) pembentukan Gugus Siaga Bencana di sekolah, ketiga adanya surat atau dokumen yang menyatakan adanya alokasi anggaran/dana untuk kegiatan kesiapsiagaan bencana di sekolah, dan yang keempat adanya surat atau dokumen yang menyatakan adanya latihan atau simulasi evakuasi bencana. Dan pada indikator penganggaran terdapat 3 poin yaitu pertama adanya pengalokasian dana untuk kegiatan kesiapsiagaan sekolah, kedua adanya dana APBN/APBD untuk mendukung kegiatan rutin dan operasional lembaga terutama untuk kegiatan pengurangan resiko bencana, dan ketiga adanya dana kontijensi yang digunakan untuk kesiapsiagaan. Lalu pada indikator program kegiatan terdapat 6 poin yaitu pertama membuat salinan/duplikat dokumen-dokumen penting sekolah

yang disimpan ditempat aman, kedua membuat rencana evakuasi, ketiga membuat prosedur tetap (protap) evakuasi, keempat membentuk posko/unit kesehatan sekolah atau PMR, kelima mengadakan pelatihan pertolongan pertama dengan didampingi oleh instansi terkait, dan keenam melakukan latihan/simulasi evakuasi secara rutin. Dan untuk indikator monitoring dan evaluasi terdapat 2 poin yaitu adanya monitoring dan evaluasi dari pihak internal dan eksternal terkait pelaksanaan sekolah siaga bencana.

3.3 JENIS DAN RANCANGAN PENELITIAN

Jenis dan rancangan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, karena menggambarkan penerapan kebijakan sekolah siaga bencana tingkat Sekolah Dasar. Jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yaitu jenis penelitian yang berupaya menggambarkan suatu fenomena sesuai dengan apa yang terjadi dilapangan, dimana data hasilkan berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Adapun data yang dikumpulkan tersebut berupa kata-kata, dokumen tertulis, dan gambar (Moleong, 2010).

3.4 SUMBER INFORMASI

Sumber informasi penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder yang selanjutnya akan diolah menjadi informasi sesuai dengan yang dibutuhkan.

3.4.1 Data Primer

Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada peneliti (Sugiyono, 2015). Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari proses observasi yang menggunakan lembar observasi dan proses wawancara menggunakan pedoman wawancara.

Penentuan sampel baik tempat maupun informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan dan tujuan tertentu (Sugiyono, 2015). Tempat penelitian yang dipilih adalah Sekolah Dasar yang merupakan inisiasi pertama Sekolah Siaga Bencana di Provinsi DIY yaitu SD X Kota Yogyakarta, selanjutnya dipilih lagi 1 SD dengan inisiasi lanjutan secara random dari 38 Sekolah Siaga Bencana tingkat Sekolah Dasar yang ada di Yogyakarta berdasarkan undian yaitu SD Y Kabupaten Sleman.

Dalam Sugiyono (2016) menyatakan bahwa sampel sebagai sumber data atau sebagai informan sebaiknya memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Mereka yang menguasai atau memahami sesuatu melalui proses enkulturasi, sehingga sesuatu itu bukan sekedar diketahui, tetapi juga dihayati.
2. Mereka yang tergolong masih sedang berkecimpung atau terlibat pada kegiatan yang tengah diteliti.
3. Mereka yang mempunyai waktu yang memadai untuk diminta informasi.
4. Mereka yang tidak cenderung menyampaikan informasi hasil “kemasannya” sendiri.

Kriteria untuk informan , antara lain:

1. Mengetahui dan memahami kebijakan yang ada di sekolah terkait visi dan misi SSB.
2. Mengetahui dan memahami kebijakan yang ada di sekolah terkait peraturan/kesepakatan SSB.
3. Mengetahui dan memahami kebijakan yang ada di sekolah terkait penganggaran SSB.
4. Mengetahui dan memahami kebijakan yang ada di sekolah terkait program kegiatan/perencanaan SSB.
5. Mengetahui dan memahami kebijakan yang ada di sekolah terkait monitoring dan evaluasi SSB.
6. Sehat jasmani dan rohani.
7. Mau diwawancarai.

Informan yang akan diwawancarai yaitu:

1. Kepala Sekolah

Kepala Sekolah memenuhi kriteria 1 hingga 7 untuk diwawancarai sebagai informan karena Kepala Sekolah selaku pimpinan memiliki tugas yaitu: menyusun perencanaan, mengorganisir kegiatan, mengarahkan kegiatan, mengkoordinir kegiatan, melaksanakan pengawasan, melakukan evaluasi setiap kegiatan, menentukan kebijaksanaan, mengadakan rapat, mengambil keputusan, mengatur proses belajar mengajar, mengatur administrasi (kantor, siswa, pegawai, perlengkapan, keuangan), mengatur organisasi siswa intra sekolah (OSIS), dan mengatur hubungan sekolah dengan masyarakat.

2. Guru Penanggung Jawab Program SSB

Guru sebagai penanggung jawab program SSB memenuhi kriteria 1 sampai 7 untuk diwawancarai sebagai informan karena mengetahui bagaimana pelaksanaan program sekolah siaga bencana di sekolah tersebut.

3. Komite Sekolah

Komite Sekolah memenuhi kriteria 3, 5, 6, dan 7 untuk diwawancarai sebagai informan. Berdasarkan pasal 56 ayat 3 UU SPN No. 20/2003 Komite Sekolah adalah lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan dengan memberikan pertimbangan, arahan, dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan. Peran Komite Sekolah yaitu:

- 1) Pemberi pertimbangan (*Advisory Agency*) dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di satuan pendidikan.
- 2) Pendukung (*Supporting Agency*) baik yang berwujud finansial, pemikiran, maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan.
- 3) Pengontrol (*Controlling Agency*) dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan.
- 4) Mediator (*Mediator Agency*) antara pemerintah (*Executive*) dengan masyarakat di satuan pendidikan.

4. Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan memenuhi kriteria 3, 5, 6, dan 7 untuk diwawancarai sebagai informan karena tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan yaitu:

- 1) Merumuskan kebijakan teknis di Bidang Pendidikan.

- 2) Menyelenggarakan urusan Pemerintahan dan pelayanan umum bidang pendidikan.
- 3) Membina dan menyelenggarakan pelaksanaan tugas dibidang pendidikan.
- 4) Melaksanakan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian, dan peralatan.
- 5) Melakukan evaluasi dan pelaporan urusan Pemerintahan dibidang pendidikan.
- 6) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

5. BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah)

BPBD memenuhi kriteria 3, 5, 6 dan 7 untuk diwawancarai sebagai informan karena memilikitugas :

- 1) Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
- 2) Menetapkan standarisasi, serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- 3) Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
- 4) Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
- 5) Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada kepala daerah setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;

- 6) Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang, serta mempertanggungjawabkan penggunaannya;
- 7) Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
- 8) Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3.4.2 Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh bukan dari informan yang akan diteliti akan tetapi dari sumber lain. Data sekunder dalam penelitian ini berasal dari dokumen yang ada di Sekolah Dasar yang menerapkan Siaga Bencana di Yogyakarta meliputi; profil sekolah, peraturan sekolah, struktur organisasi sekolah, program SSB, serta dokumen atau informasi pendukung lainnya.

3.5 INSTRUMEN PENELITIAN DAN PENGAMBILAN DATA

1.5.1 Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati (Sugiyono, 2016). Pada penelitian ini peneliti menggunakan alat berupa:

3.5.1.1 Lembar Observasi

Lembar observasi digunakan untuk membantu dalam proses observasi di lapangan. Lembar observasi dalam penelitian ini digunakan untuk membantu mengidentifikasi kebijakan-kebijakan yang ada di sekolah yang kemudian akan di analisis menggunakan standar yang dijadikan sebagai acuan (Sugiyono, 2016). Standar yang digunakan merupakan standar yang berkaitan dengan Sekolah Siaga

Bencana (SSB), untuk mengetahui penerapan SSB yang diterapkan dilapangan dibandingkan dengan standar acuan yang digunakan dalam penelitian. Standar yang digunakan dalam penelitian ini adalah kebijakan sekolah dengan beberapa indikator didalamnya yang dalam pengumpulan datanya menggunakan lembar observasi.

3.5.1.2 Pedoman Wawancara

Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semi terstruktur (*semistruktur interview*), yaitu wawancara yang dalam pelaksanaanya lebih bebas dan bertujuan untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat dan ide-idenya (Sugiyono, 2015). Wawancara ini digunakan untuk mengetahui kebijakan sekolah yang diterapkan terkait Sekolah Siaga Bencana.

Menurut Sugiyono (2016), supaya hasil wawancara dapat terekam dengan baik dan peneliti memiliki bukti telah melakukan wawancara kepada informan atau sumber data, maka diperlukan bantuan alat meliputi:

1. Buku catatan: Berfungsi untuk mencatat semua percakapan hasil wawancara dengan sumber data.
2. *Tape recorder*: Berfungsi untuk merekam semua percakapan atau pembicaraan dengan sumber data atau informan.
3. Kamera: Berfungsi untuk memotret ketika peneliti sedang melakukan pembicaraan dengan informan sehingga dapat meningkatkan keabsahan penelitian karena peneliti betul-betul melakukan pengumpulan data.

3.5.1.3 Lembar Studi Dokumentasi

Lembar studi dokumentasi digunakan untuk memudahkan peneliti dalam pengumpulan data berkaitan dengan studi dokumentasi di lapangan. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Lembar studi dokumentasi berisi indikator terkait penerapan SSB yang akan diteliti dibandingkan atau dibuktikan dengan studi dokumen yang berkaitan dengan standar SSB yaitu kebijakan sekolah. Dokumen bisa berupa profil sekolah, dokumen kebijakan sekolah, perencanaan kesiapsiagaan sekolah, dan dokumen pendukung lainnya (Sugiyono, 2016).

Standar yang digunakan dalam penelitian ini adalah kebijakan sekolah siaga bencana dengan beberapa indikator didalamnya yang dalam pengumpulan datanya menggunakan lembar studi dokumentasi.

3.5.2 Teknik Pengambilan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan (Sugiyono, 2016).

Teknik yang digunakan dalam pengambilan data pada penelitian ini meliputi:

3.5.2.1 Observasi

Teknik observasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah teknik observasi partisipasi pasif (*passive participation*). Dalam hal ini peneliti datang di tempat kegiatan orang yang diamati, tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan tersebut. Dengan observasi partisipan ini, maka data yang diperoleh akan lebih

lengkap, tajam, dan sampai mengetahui pada tingkat mana dari setiap perilaku yang nampak (Sugiyono, 2016).

3.5.2.2 Wawancara

Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semi terstruktur (*semistructure interview*), yaitu wawancara yang dalam pelaksanaannya lebih bebas dan bertujuan untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat dan ide-idenya (Sugiyono, 2015). Wawancara ini digunakan untuk mengetahui kebijakan sekolah yang diterapkan terkait Sekolah Siaga Bencana.

3.5.2.3 Studi Dokumen

Menurut Sugiyono (2016), studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian evaluatif deskriptif. Hasil penelitian dari observasi dan wawancara akan lebih kredibel atau dapat dipercaya apabila didukung oleh dokumentasi. Studi dokumen dalam penelitian ini didapatkan berdasarkan variabel dalam penelitian.

3.6 PROSEDUR PENELITIAN

Prosedur penelitian dalam penelitian ini dilakukan dalam 3 tahap meliputi:

3.6.1 Tahap Pra Penelitian

Tahapan awal penelitian ini adalah kegiatan yang dilakukan sebelum melakukan penelitian. Adapun kegiatan pada awal penelitian ini meliputi:

1. Menyusun proposal penelitian.
2. Menentukan tempat penelitian.
3. Mengurus perizinan di Jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat dan tempat penelitian.

4. Melakukan studi pendahuluan melalui data sekunder.
5. Melakukan seminar proposal penelitian.

3.6.2 Tahap Pelaksanaan Penelitian

Tahap penelitian adalah kegiatan yang dilakukan saat pelaksanaan penelitian.

Adapun kegiatan pada penelitian meliputi:

1. Melakukan observasi lapangan.
2. Melakukan wawancara mendalam dengan narasumber.
3. Mencatat dan merekam serta mendokumentasikan selama proses penelitian.
4. Melakukan studi dokumentasi.

3.6.3 Tahap Pasca Penelitian

Tahapan akhir penelitian yaitu kegiatan yang dilakukan setelah penelitian.

Adapun kegiatan setelah penelitian meliputi:

1. Melakukan pencatatan data hasil penelitian.
2. Melakukan analisis data.
3. Membuat laporan penelitian.

3.7 PEMERIKSAAN KEABSAHAN DATA

Pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi dengan sumber. Triangulasi dalam pengujian kredibilitas diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Triangulasi sumber digunakan untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber (Sugiyono, 2016).

Triangulasi dengan sumber dilakukan dengan cara meliputi:

3.7.1 Cross-check data dengan fakta dari sumber lainnya

Sumber tersebut mungkin berupa informan yang berbeda, teknik riset yang berbeda untuk menggali topik yang sama, atau hasil dari sumber lainnya dan dari studi riset yang sama. Datanya harus memperkuat atau tidak ada kontradiksi (Sumantri, 2011).

3.7.2 Membandingkan dan melakukan kontras data

Dapat dilakukan pada rancangan penelitian dengan memasukkan kategori informan yang berbeda. Membandingkan dan melakukan kontras pada data adalah penting jika mencoba mengidentifikasi variabel atau ingin melakukan konfirmasi hubungan antar variabel (Sumantri, 2011).

3.7.3 Gunakan kelompok informan yang sangat berbeda semaksimal mungkin

Di dalam rancangan studi dan sampel, dinyatakan bahwa sangat berguna untuk mencari kategori informan yang berbeda (*extreme*) dalam variabel tertentu (Sumantri, 2011).

3.8 ANALISIS DATA

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih yang penting, dan membuat kesimpulan yang mudah dipahami (Sugiyono, 2015).

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah pengumpulan data dalam periode waktu

tertentu. Pada saat wawancara, analisis data sudah dilakukan terhadap jawaban yang diberikan oleh informan. Apabila jawaban dari informan setelah dianalisis terasa belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi sampai tahap tertentu, sehingga diperoleh data yang dianggap kredibel (Sugiyono, 2015).

Langkah-langkah dalam melakukan analisis data dengan model Miles dan Huberman adalah:

3.8.1. Data *Reduction* (Reduksi Data)

Mereduksi data dilakukan dengan merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan dengan hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya, sehingga data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti dalam melakukan pengumpulan data selanjutnya atau mencarinya bila diperlukan (Sugiyono, 2015).

3.8.2. Data *Display* (Penyajian Data)

Langkah analisis data berikutnya adalah menyajikan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Dengan menyajikan data, maka akan mempermudah dalam memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami (Sugiyono, 2015).

3.8.3. *Conclusion Drawing* atau *Verification*

Setelah melakukan analisis data maka dilakukan penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara yang akan berubah apabila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang

mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya, namun apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel (Sugiyono, 2015).

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan yang bersifat baru, yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan ini berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih belum jelas, sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori (Sugiyono, 2015). Data yang dikumpulkan dengan wawancara dan observasi, dianalisis untuk menggambarkan penerapan kebijakan sekolah siaga bencana tingkat Sekolah Dasar di Yogyakarta.

BAB VI

SIMPULAN DAN SARAN

6.1 SIMPULAN

Penelitian yang berjudul “Gambaran Penerapan Kebijakan Sekolah Siaga Bencana tingkat Sekolah Dasar di Yogyakarta Tahun 2019”, terdapat 5 indikator yang harus dipenuhi, meliputi: visi dan misi; peraturan/kesepakatan; penganggaran; program kegiatan/perencanaan; serta monitoring dan evaluasi. Berdasarkan uraian hasil penelitian yang telah disampaikan dapat ditarik simpulan sebagai berikut:

1. Penilaian penerapan kebijakan Sekolah Siaga Bencana berjumlah 17 indikator yang terdiri dari: visi dan misi dengan jumlah 2 poin indikator; peraturan/kesepakatan dengan jumlah 4 poin indikator; penganggaran dengan jumlah 3 poin indikator; program kegiatan/perencanaan dengan jumlah 6 poin indikator; serta monitoring dan evaluasi dengan jumlah 2 poin indikator.
2. Gambaran penerapan kebijakan Sekolah Siaga Bencana di SD X Kota Yogyakarta dari 17 indikator terdapat 10 (58,8%) indikator yang sesuai dengan parameter kebijakan sekolah siaga bencana, 5 (29,4%) indikator tidak sesuai, dan 2 (11,8%) indikator belum diterapkan.
3. Sedangkan gambaran penerapan kebijakan Sekolah Siaga Bencana di SD Y Kabupaten Sleman dari 17 indikator terdapat 10 (58,8%) indikator yang sesuai dengan parameter kebijakan sekolah siaga bencana, 3 (17,7%) indikator tidak sesuai, dan 4 (23,5%) indikator belum diterapkan.

4. Gambaran penerapan kebijakan Sekolah Siaga Bencana di SD X Kota Yogyakarta berdasarkan setiap indikator meliputi visi misi ada 2 poin indikator dan sesuai (100%); peraturan/kesepakatan ada 2 poin indikator sesuai (50%), 1 poin indikator tidak sesuai (25%), dan 1 poin indikator belum diterapkan (25%); penganggaran ada 3 poin indikator sesuai (100%); program kegiatan/perencanaan ada 3 poin indikator sesuai (50%), 2 poin indikator tidak sesuai (33,3%), dan 1 poin indikator belum diterapkan (16,7%); monitoring dan evaluasi ada 2 poin indikator dan tidak sesuai (100%).
5. Sedangkan gambaran penerapan kebijakan Sekolah Siaga Bencana di SD Y Kabupaten Sleman meliputi visi dan misi ada 2 poin indikator dan sesuai (100%); peraturan/kesepakatan ada 2 poin indikator sesuai (50%), 1 poin indikator tidak sesuai (25%), dan 1 poin indikator belum diterapkan (25%); penganggaran ada 3 poin indikator sesuai (100%); program kegiatan/perencanaan ada 3 poin indikator sesuai (50%), 2 poin indikator tidak sesuai (33,3%), dan 1 poin indikator belum diterapkan (16,7%); monitoring dan evaluasi ada 2 poin indikator belum diterapkan (100%).
6. Dari hasil tersebut, penerapan kebijakan sekolah siaga bencana di SD X Kota Yogyakarta lebih tinggi dari SD Y Kabupaten Sleman, karena jumlah indikator yang belum diterapkan di SD Kota Yogyakarta ada 3 poin indikator (17,7%) sedangkan yang belum diterapkan di SD Y Kabupaten Sleman ada 5 poin indikator (29,4%).

7. Faktor internal yang menghambat dalam penerapan kebijakan SSB tingkat sekolah dasar di SD X Kota Yogyakarta antara lain belum tersedianya Surat Keputusan (SK) pembentukan Gugus Siaga Bencana di Sekolah dan belum tersedianya prosedur tetap (protap) evakuasi karena belum dibuat oleh Kepala Sekolah. Hal ini dikarenakan kurangnya pengetahuan dan mitra pihak sekolah dalam penerapan program sekolah siaga bencana.
8. Sedangkan faktor internal yang menghambat dalam penerapan kebijakan SSB tingkat sekolah dasar di SD Y Kabupaten Sleman antara lain belum tersedianya surat atau dokumen yang menyatakan adanya latihan/simulasi evakuasi bencana; belum tersedianya prosedur tetap (protap) evakuasi; serta tidak dilakukan monitoring dan evaluasi dari pihak internal dan eksternal terkait pelaksanaan program sekolah siaga bencana. Hal ini dikarenakan kurangnya pengetahuan dan kemitraan pihak sekolah dalam penerapan program sekolah siaga bencana misal BPBD dan Dinas Pendidikan.
9. Faktor eksternal yang menghambat dalam gambaran penerapan kebijakan SSB tingkat sekolah dasar di SD X Kota Yogyakarta dan SD Y Kabupaten Sleman antara lain pada indikator penganggaran dan monitoring evaluasi yaitu minimnya dukungan pendanaan operasional SSB dari pemerintah, dan belum adanya monitoring dan evaluasi pelaksanaan SSB dari pihak lembaga terkait seperti BPBD dan Dinas Pendidikan.

6.2 SARAN

Berdasarkan hasil penelitian tentang gambaran penerapan kebijakan Sekolah Siaga Bencana tingkat Sekolah Dasar di Yogyakarta, saran yang dapat direkomendasikan antara lain:

6.2.1 Sekolah

1. Kepala Sekolah perlu membuat SK (surat keputusan) pembentukan Gugus Siaga Bencana di sekolah, dan program penyusunan dokumen implementatif yang menyatakan adanya latihan atau simulasi evakuasi bencana.
2. Kepala Sekolah perlu menyusun SOP berdasarkan enam prosedur dasar kedaruratan seperti evakuasi (dari) bangunan/gedung, perlindungan di tempat, mengunci diri, berkumpul dan berlindung di luar, evakuasi ke tempat aman, proses aman penyatuan kembali (reunifikasi) keluarga.
3. Kepala sekolah, guru, dan staff sekolah perlu melakukan monitoring dan evaluasi terkait pelaksanaan program sekolah siaga bencana.
4. Kepala Sekolah perlu meningkatkan kemitraan dengan lembaga pemerintahan dan masyarakat dalam pendidikan baik perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha, maupun organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan.

6.2.2 BPBD

BPBD Kota Yogyakarta dan BPBD Kabupaten Sleman perlu melakukan monitoring dan evaluasi berupa pengawasan dan penilaian pelaksanaan penerapan kebijakan sekolah yang sudah dibentuk menjadi sekolah siaga bencana termasuk

SD X Kota Yogyakarta dan SD Y Kabupaten Sleman untuk mengetahui sejauh mana penerapan Sekolah Siaga Bencana di sekolah tersebut secara berkala setidaknya satu kali dalam satu tahun. Serta perlu adanya sosialisasi dan pelatihan/simulasi secara rutin untuk meningkatkan kesiapsiagaan sekolah.

6.2.3 Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta dan Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman diharapkan mampu menjadikan pendidikan kebencanaan sebagai muatan lokal tersendiri dan perlu meningkatkan alokasi anggaran yaitu 20% dari APBD untuk pendidikan dan 1% untuk pengurangan risiko bencana untuk mendukung kesiapsiagaan terhadap situasi darurat pada para siswa di sekolah tersebut secara berkelanjutan, serta melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala pada sekolah siaga bencana yang telah dibentuk.

6.2.4 Peneliti selanjutnya

Peneliti selanjutnya dapat menggunakan hasil penelitian ini untuk meningkatkan kebijakan Sekolah Siaga Bencana tingkat Sekolah Dasar. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat menyusun program-program terkait dengan indikator Sekolah Siaga Bencana yang masih rendah dalam penerapannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Amri, dkk. (2016). *Risiko Bencana Indonesia*. Jakarta: Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
- Anies. (2018). *Manajemen Bencana: Solusi Untuk Mencegah dan Mengelola Bencana*. Jakarta: Gosyen Publishing.
- Ariantoni, dkk. (2009). *Modul Pelatihan: Pengintegrasian Pengurangan Resiko Bencana (PRB) ke dalam Sistem Pendidikan*. Jakarta: Pusat Kurikulum Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan Nasional.
- BNPB. (2017). *Definisi dan Jenis Bencana*. <https://www.bnpb.go.id/home/definisi> (diakses pada 20 Maret 2019).
- BNPB. (2019). *Data Informasi Bencana Indonesia*. <http://dibi.bnpb.go.id> diakses pada 20 Maret 2019.
- Budiono, dkk. (2017). *Pedoman Penyusunan Skripsi Jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Negeri Semarang Tahun 2017*. Semarang: IKM UNNES.
- Budiono & Sulistyowati. (2013). Peran UKS (Usaha Kesehatan Sekolah) Dalam Penyampaian Informasi Kesehatan Reproduksi Terhadap Siswa SMP Negeri X Di Surabaya. *Jurnal Promkes*, 1 (2), 184-191
- Codreanu, T. A., Celenza, A., & Jacobs, I. (2014). Does disaster education of teenagers translate into better survival knowledge, knowledge of skills, and adaptive behavioral change? A systematic literature review. *Prehospital and Disaster Medicine*, 29(6), 629–642.
- Crunch, C. (2018). Earthquakes in Europe. Issue No. 51, July 2018.
- DIBI, BNPB. (2017). *Data Kebencanaan Indonesia*. <http://dibi.bnpb.go.id/> (diakses pada 30 Maret 2019).
- Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah. (2010). *Strategi Pengarusutamaan pengurangan Resiko Bencana di Sekolah*. Jakarta : Kementerian Pendidikan Nasional, h. 14-15
- Djupri, M. (2012). Model Manajemen Pembiayaan Pendidikan Menuju SBI di SMP N 2 Rembang. *Journal of Economic Education*, 1(1), 21-25.
- Hasmi. (2011). *Teknik Penyidikan Wabah (Kejadian Luar Biasa)*. Jakarta: TIM.

- Hariyanto. (2018). *BNPB: Sudah 438 Bencana di 2018, Longsor Paling Banyak Makan Korban*. <https://news.detik.com/berita/d-3882938/bnpb-sudah-438-bencana-di-2018-longsor-paling-banyak-makan-korban> (diakses pada 30 Maret 2019).
- Hartuti. (2009). *Buku Pintar Gempa*. Jakarta: DIVA Press.
- Idhom. (2018). *BNPB: 606 Sekolah Rusak Akibat Gempa Lombok, Termasuk 3.051 Kelas*. <https://tirto.id/bnpb-606-sekolah-rusak-akibat-gempa-lombok-termasuk-3051-kelas-cR2T> (diakses pada 25 Februari 2019).
- Intan, G. (2019). *Pemerintah Anggarkan 15 Triliun Untuk Mitigasi Bencana Tahun 2019*. <https://www.voaindonesia.com/a/pemerintah-anggarkan-15-triliun-untuk-mitigasi-bencana-tahun-2019/4732184.html> (diakses pada 21 Februari 2019).
- Kurniadin dan Machali. (2013). *Manajemen Pendidikan*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Kusuma. (2018). *Mendikbud: 2.736 Gedung Sekolah Rusak Akibat Gempa Palu*. <https://regional.kompas.com/read/2018/10/03/12242081/mendikbud-2736-gedung-sekolah-rusak-akibat-gempa-palu> (diakses pada 20 Februari 2019).
- Konsorsium Pendidikan Bencana Indonesia. (2011). *Kerangka Kerja Sekolah Siaga Bencana*. Jakarta: Konsorsium Pendidikan Bencana.
- Lesmana & Purborini. (2015). Kesiapsiagaan Komunitas Sekolah dalam Menghadapi Bencana di Kabupaten Magelang. *Jurnal Teknik Sipil*, 11(1), 1–75.
- LIPI UNESCO/ISDR. (2006). *Kajian Kesiapsiagaan Masyarakat dalam Mengantisipasi Bencana Gempa dan Tsunami*. Jakarta : Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI).
- LIPI. (2010). *Sekolah Siaga Bencana: Pembelajaran dari Kota Bengkulu*. Jakarta: Pusat Penelitian Oseanografi LIPI.
- LIPI. (2011). *Panduan Monitoring dan Evaluasi Sekolah Siaga Bencana*. Jakarta: Pusat Penelitian Oseanografi LIPI.
- LIPI. (2013). *Panduan Penerapan Sekolah Siaga Bencana*. Bandung: Pusat Penelitian Geoteknologi LIPI.
- Madjid, N. (2018). *Analisis Metode Penghitungan dan Alokasi Anggaran Bencana Alam*. Simposium Nasional Keuangan Negara.

- Moleong, L. J. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: Rosdakarya.
- Nuraini. (2018). *Manajemen Program Sekolah Siaga Bencana di SD Negeri Selomulyo Ngaglik Sleman*. Yogyakarta: UNY.
- Nurjanah, dkk. (2012). *Manajemen Bencana*. Jakarta: Alfabeta, CV.
- Peraturan Kepala BNPB No. 03 Tahun 2012 tentang Panduan Penilaian Kapasitas Daerah Dalam Penanggulangan Bencana.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana
- Perry, RW and MK Lindell. (2008). Volcanic Risk Perception and Adjustment in Multi Hazard Environment. *Journal of Volcanology and Geothermal Research*, 172, 170-178.
- Purnamasari, A. (2018). *Penerapan Sistem Manajemen Kebakaran di Laboratorium Praktik Teknik Mesin*. HIGEIA 2 (3).
- Ramli, S. (2010). *Manajemen Bencana*. Jakarta. Dian Rakyat.
- Republik Indonesia. (2006). *Rencana Aksi Nasional Pengurangan Resiko Bencana 2006-2009*. Jakarta: Perum Percetakan Republik Indonesia.
- Republik Indonesia. (2015). *Rencana Aksi Nasional Pengurangan Resiko Bencana 2015-2019*. Jakarta: Perum Percetakan Republik Indonesia.
- Republik Indonesia. (2007). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana*. Jakarta: Perum Percetakan Republik Indonesia.
- Rijanta, dkk. (2014). *Modal Sosial dalam Manajemen Bencana*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Septikasari & Ayriza (2018). *Strategi Integrasi Pendidikan Kebencanaan Dalam Optimalisasi Ketahanan Masyarakat Menghadapi Bencana Erupsi Gunung Merapi*. *Jurnal Ketahanan Nasional*, 24(1): 47-59.

- Sidik. (2017). *Bantul bentuk 4 Sekolah Siaga Bencana 2017*. <https://jogja.antaranews.com/berita/344633/bantul-bentuk-empat-sekolah-siaga-bencana-2017> (diakses pada 21 Februari 2019).
- Sigit, dkk. (2018). *Buku Pintar Mengenal Bencana Alam*. Yogyakarta: Deepublish.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Jakarta: Alfabeta, CV.
- Sumantri. (2011). *Metode Penelitian Kesehatan*. Jakarta: Prenada Media Grup.
- Suara Pembaruan. (2014). *Antisipasi Bencana, Tiru Pola Jepang Dalam Alokasi Dana*. <https://sp.beritasatu.com/home/antisipasi-bencana-tiru-pola-jepangdalam-alokasi-dana/49118#> (diakses pada 21 Februari 2019).
- Susanti. (2014). *Hubungan Kebijakan, Sarana dan Prasarana dengan Kesiapsiagaan Komunitas Sekolah Siaga Bencana Banda Aceh*. *Jurnal Ilmu Kebencanaan*, 1(1), 42–29.
- Susilawaty, dkk. (2012). *Manajemen Berbasis Sekolah Dalam Pengelolaan Pembiayaan Sekolah di SD Negeri 4 Kota Banda Aceh*. *Jurnal Administrasi Pendidikan*. 34-47
- Sutton, J and K. Tierney. (2006). *Disaster Preparedness: Concepts, Guidance and Reserach*. The Fritz Institute: San Fransisco.
- Taufik, A. (2016). *Implementasi Kebijakan Sekolah Siaga Bencana dalam Membangun Resiliensi Sekolah di SMP N 2 Cangkringan Kabupaten Sleman*. *Jurnal Kebijakan Pendidikan*, 4(1): 408-418.
- Triwiyanto, T. (2015). *Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan untuk Penilaian Kinerja Manajerial Kepala Sekolah*. *Cakrawala Pendidikan*, No. 1.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular.
- Wibowo, A. (2014). *Implementasi Sekolah Siaga Bencana (SSB) pada SMK Nasional Berbah*. Skripsi. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.

Zahrudin, Arifin, Z., & Suhandi, A. (2019). Implementasi Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah. *Jurnal Administrasi Pendidikan*, 26 (1): 46-56.